

LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEPATUHAN DALAM
SIKLUS PEMBAYARAN UTANG USAHA DI PT PESF**



Dosen Pembimbing
Reny Lia Riantika, S.E., M.Acc.,Ak.

Disusun Oleh:
Fatihatun Nuril Ulya
NIM: 22312178

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Fatihatun Nuril Ulya

NIM : 22312178

Program Studi : Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia.

Judul Kegiatan : Analisis Pengendalian Internal dan Kepatuhan Dalam Siklus
Pembayaran Utang Usaha di PT PESF

Tempat Pelaksanaan : Tuban, Jawa Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1) Laporan akhir magang ini adalah tulisan saya sendiri yang dibuat tanpa bantuan dari orang lain, kecuali dari pembimbing dan narasumber yang terkait.
- 2) Laporan akhir magang ini belum pernah diterbitkan ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun baik di Universitas Islam Indonesia ataupun di perguruan tinggi lainnya.
- 3) Pada laporan akhir magang ini tidak terdapat karya orang lain yang ditulis kecuali dicantumkan dalam bentuk kutipan dan rujukan yang mana tercantum juga dalam daftar pustaka sebagai referensi.

Yogyakarta, Februari 2026



Fatihatur Nuril Ulya NIM
(22312178)

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEPATUHAN DALAM
SIKLUS PEMBAYARAN UTANG USAHA DI PT PESF**

Dibuat oleh :

Fatihatul Nuril Ulya

Nomor Induk Mahasiswa : 22312178

Disahkan oleh,

Yogyakarta, 30 Maret 2026

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reny Lia Riantika'.

Reny Lia Riantika, S.E., M.Acc.,Ak.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/MAGANG

MAGANG BERJUDUL

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEPATUHAN DALAM SIKLUS PEMBAYARAN
UTANG USAHA DI PT PESF**

Disusun oleh : FATIHATUN NURIL ULYA

Nomor Mahasiswa : 22312178

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 13 April 2026

Penguji/Pembimbing Magang : Reny Lia Riantika, SE., M.Acc.

Penguji : Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelimpahan dan kenikmatan rahmat-Nya serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan akhir magang dengan judul "Analisis Pengendalian Internal dan Kepatuhan Dalam Siklus Pembayaran Utang Usaha di PT PESF". Laporan akhir magang ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (S1). Adapun tujuan penyusunan laporan akhir magang ini adalah untuk menganalisis penerapan pengendalian internal dan tingkat kepatuhan dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengendalian internal dan praktik akuntansi yang berlaku. Dalam menyelesaikan laporan akhir magang ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatannya membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk membantu penyelesaiannya. Dibutuhkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan laporan akhir magang ini. Tanpa bantuan-Nya, mungkin penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk terus berusaha menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.
2. Orang tua saya tercinta, khususnya superhero saya Bapak Marwi dan pintu surga saya Ibu Siti Alfiyah, yang dengan ketulusan dan keikhlasan senantiasa memberikan doa, motivasi, kasih sayang, serta pengorbanan yang tak terhingga, sehingga saya mampu menempuh dan menyelesaikan setiap tahapan perjalanan akademik ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga saya sampaikan kepada Kakek Suhadak, Nenek Warsinah, dan Tante Ilma atas dukungan, perhatian, doa, serta kasih sayang tulus yang selalu mengiringi langkah saya.
3. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPAS, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., SH., M.Sc., Ph.D., selaku Kepala Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Muamar Nur Kholid S.E., Ak., M.Ak., selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Reny Lia Riantika, S.E., M.Acc.,Ak. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran, menyediakan tenaga, waktu, dan pikiran dalam proses penyusunan laporan akhir magang ini.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan dan membantu saya selama masa perkuliahan.
8. Pimpinan dan seluruh karyawan PT PESF, khususnya para mentor saya: Mas Kingkin, Bu Dewi, Pak Indra, Mas Bima, dan Mba Iva, yang telah memberikan bimbingan, membantu, serta memfasilitasi penulis selama pelaksanaan magang ini.
9. *My Special Person* Wildan Arif Rahmatulloh, sebagai *support system* terbaik sekaligus garda terdepan yang tak pernah lelah memberikan semangat, doa, serta energi positif. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu membersamai, memberikan kesabaran ekstra, dan meyakinkan penulis dalam setiap langkah jatuh bangun hingga laporan akhir magang ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat-sahabat penulis: Asna, Winda, Gandes, Nada, Resya, dan Ais, yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang penuh makna selama proses penyusunan laporan akhir magang ini. Terima kasih atas segala doa, motivasi, canda, dan perhatian yang telah diberikan sehingga penulis dapat melewati berbagai tantangan dengan lebih kuat dan penuh semangat.
11. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan laporan akhir magang ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang positif sangat diharapkan oleh penulis demi pengembangan proposal ini di masa depan, sehingga dapat menjadi sebuah karya tulis yang bermanfaat bagi banyak orang.

Yogyakarta, Februari 2026



Fatihatur Nuril Ulya
NIM 22312178

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Magang.....	5
1.4 Manfaat Magang.....	5
1.4.1 Bagi Penulis	5
1.4.2 Bagi Perusahaan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	7
2.1.2 Pengendalian Internal	8
2.1.3 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	9
2.1.4 Siklus Pembayaran Utang Usaha	10
2.2 Penelitian Terdahulu.....	10
2.3 Kerangka Pemikiran	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1 Jenis Penelitian	15
3.2 Sumber Data Penelitian	15

3.3	Teknik Pengumpulan Data	16
3.4	Teknik Analisis Data	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		19
4.1	Profil Perusahaan	19
4.1.1	Gambaran Umum dan Visi Misi PT PESF	19
4.1.2	Struktur Organisasi	21
4.1.3	Tempat dan Waktu Kegiatan	23
4.1.4	Data Peserta	23
4.2	Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Magang	23
4.3	Ketercapaian Aktivitas Magang	26
4.4	Hasil dan Pembahasan	29
4.4.1	Hasil Penelitian	29
4.4.2	Pembahasan Penelitian	34
4.4.2.1	Gambaran Umum Aktivitas Pembayaran Utang Usaha	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.4.2.2	Penerapan Pengendalian Internal dalam Setiap Tahapan Siklus Pembayaran Utang Usaha	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.4.2.3	Pihak yang Terlibat dan Unit Pelaksana Pengendalian Internal	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.4.2.4	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Tingkat Kepatuhan dalam Proses Pembayaran Utang Usaha di PT PESF	40
4.4.2.5	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Internal dan Kepatuhan dalam Pembayaran Utang Usaha	43
BAB V PENUTUP		46
5.1	Kesimpulan	46
5.2	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		50
LAMPIRAN		53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1 Aktivitas Magang	26
Tabel 4.2 Penerapan Pengendalian Internal dalam Siklus Pembayaran Utang Usaha ..	30
Tabel 4.3 Struktur dan Pihak yang Terlibat.....	31
Tabel 4.4 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kepatuhan.....	33
Tabel 4.5 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Internal	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	14
Gambar 4.1 PT PESF.....	19
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT PESF	21
Gambar 4.3 Struktur Organisasi PT PESF	21
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Fungsi <i>Finance</i> PT PESF	22
Gambar 4.5 <i>Flowchart</i> Aktivitas Pembayaran Utang Usaha	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Curriculum Vitae (CV)	53
Lampiran 2. Hasil wawancara	55
Lampiran 3. Sistem aplikasi P2P dan Outputnya	79
Lampiran 4. Sistem aplikasi MYSAP.....	80
Lampiran 5. Sistem aplikasi P-Office	80

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian internal serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur dalam siklus pembayaran utang usaha pada PT PESF yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi (migas). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta studi dokumentasi terhadap prosedur dan sistem yang digunakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha telah berjalan secara sistematis dan terstruktur. Perusahaan menerapkan mekanisme *three-way matching* yang mencocokkan *invoice*, *purchase order*, dan dokumen penerimaan barang atau jasa sebelum proses pembayaran dilakukan. Selain itu, penerapan prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara fungsi pengajuan, verifikasi, dan persetujuan pembayaran mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Penggunaan sistem terintegrasi seperti MySAP, P2P, dan P-Office juga mendukung proses pengendalian dan pemantauan transaksi secara lebih efektif.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa risiko yang bisa terjadi, seperti kemungkinan *human error* dalam penginputan data serta ketergantungan pada kelengkapan dokumen dari pihak terkait. Oleh karena itu, peningkatan integrasi sistem dan penguatan kontrol operasional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi perusahaan untuk memperkuat sistem pengendalian internal serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan kajian terkait pengendalian internal pada sektor migas.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Utang Usaha, Kepatuhan, Siklus Pembayaran, Migas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri minyak dan gas merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian modern yang memiliki karakteristik operasional yang kompleks dan dinamis. Aktivitas di sektor ini dipengaruhi oleh berbagai variabel global secara signifikan memengaruhi aktivitas pada bidang ini, termasuk fluktuasi harga energi internasional, inovasi teknologi, tekanan transisi menuju energi rendah karbon, serta tuntutan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan demi memenuhi standar kelestarian alam. Selain membutuhkan investasi modal yang besar, industri minyak dan gas juga dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi, baik dari sisi teknis, finansial, maupun lingkungan, sehingga menuntut pengelolaan risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan (L&G Insurance Broker, 2024). Oleh karena itu perusahaan yang bergerak di sektor ini dituntut memiliki manajemen yang kuat, strategi jangka panjang, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan geopolitik dan tren energi global. Selain itu, transformasi digital, peningkatan standar regulasi, dan tuntutan tanggung jawab sosial turut membentuk bagaimana perusahaan modern harus beroperasi dan mengelola risiko dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif (Devine Cons, 2025).

Industri minyak dan gas di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks akibat regulasi yang ketat, risiko operasional yang tinggi, serta fluktuasi harga komoditas global, meskipun sektor ini merupakan salah satu kontributor utama pendapatan negara. Dalam konteks tersebut, PT P (Persero) sebagai BUMN energi terintegrasi terbesar di Indonesia menjalankan seluruh rantai nilai bisnis migas dari hulu hingga hilir (Dunia Energi, 2026; Rofyanto Kurniawan & Hidayat Amir, 2017). Seiring dengan transformasinya menjadi *holding company*, PT P mengelola berbagai *subholding* dan anak usaha yang mencakup kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk energi dan petrokimia, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat sinergi bisnis, serta meningkatkan daya saing global, sekaligus mempertahankan kontribusi signifikan terhadap APBN melalui dividen dan pajak. Namun demikian, kompleksitas struktur organisasi dan skala operasi tersebut menjadikan

pengelolaan keuangan sebagai tantangan krusial, terutama karena tingginya ketergantungan pada transaksi bernilai besar dengan pihak eksternal seperti vendor dan kontraktor (Pertamina Training & Consulting (PTC), 2025).

Sebagai bagian dari *subholding upstream*, termasuk PT PESF, memiliki peran strategis dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas guna mendukung pencapaian target *lifting* nasional. Dalam pelaksanaannya, aktivitas operasional ini tidak terlepas dari permasalahan pengelolaan keuangan, khususnya pada siklus pembayaran utang usaha yang melibatkan transaksi intensif dengan vendor eksternal. Siklus tersebut mencakup proses penerimaan faktur, verifikasi dokumen pendukung seperti faktur pajak dan bukti penerimaan barang atau jasa, pencatatan dalam sistem aplikasi internal, hingga pelaporan ke zona pusat, sehingga melibatkan pengakuan kewajiban dan pengeluaran material yang signifikan. Oleh karena itu, siklus pembayaran utang usaha merupakan salah satu area paling krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan sekaligus rentan terhadap kesalahan dan kecurangan akibat kompleksitas dokumen dan tingginya volume transaksi (Herry, 2011). Kondisi ini berpotensi memperburuk kinerja keuangan perusahaan, terutama di tengah ketidakpastian pasar minyak global, serta meningkatkan biaya operasional apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam mengelola siklus tersebut, dua elemen krusial adalah pengendalian internal dan kepatuhan. Adapun pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang diterapkan manajemen untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan kebijakan internal (Mulyadi, 2023). Dan kepatuhan (*compliance*) secara umum didefinisikan sebagai sikap dan perilaku taat serta pemenuhan penuh terhadap peraturan, norma hukum, kebijakan, atau standar yang berlaku dari pihak berwenang, baik eksternal maupun internal. Menurut teori kepatuhan, konsep ini mencakup disiplin dalam melaksanakan kewajiban untuk menghindari sanksi, memastikan transparansi, dan mendukung integritas organisasi (Rahayu, 2017). Dalam siklus pembayaran utang usaha, kepatuhan berhubungan erat dengan pengendalian internal karena keduanya saling melengkapi untuk memastikan proses dari penerimaan faktur, verifikasi dokumen, hingga pembayaran dilakukan sesuai regulasi perpajakan,

standar akuntansi keuangan (SAK), dan prosedur internal, sehingga mencegah *overpayment*, *duplicate payment*, atau pelanggaran hukum (Herry, 2011).

Dalam konteks lapangan produksi migas seperti PT PESF, transaksi dengan vendor lokal maupun internasional melibatkan nilai kontrak yang besar, tingkat *asset specificity* yang tinggi, serta kewajiban perpajakan yang kompleks. Kondisi tersebut menuntut penerapan pengendalian internal yang memadai, khususnya dalam siklus pembayaran utang usaha, karena kelemahan pengendalian dapat berpotensi menimbulkan akumulasi utang yang tidak terkendali, kesalahan pembayaran, serta ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Lebih lanjut, kompleksitas dokumen transaksi seperti *purchase order*, *goods receipt*, *invoice*, dan faktur pajak yang disertai tingginya frekuensi transaksi menjadikan siklus pembayaran utang kepada pemasok sebagai area yang rentan terhadap *fraud*. Apabila pengendalian internal tidak berjalan secara efektif, kondisi tersebut dapat mengakibatkan *overpayment*, *duplicate payment*, pembayaran kepada vendor fiktif, serta kesalahan pencatatan utang yang berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan (Ni Luh Febri Mahendri *et al.*, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian empiris menunjukkan bahwa permasalahan pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha masih menjadi isu krusial di industri minyak dan gas Indonesia, yang semakin diperparah oleh ketidakefisienan proses, dampak pandemi, serta transisi menuju energi hijau, sehingga menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri ESDM terkait pengelolaan keuangan BUMN (Indonesia - & Team, 2024).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Setyawati *et al.*, 2024) pada sektor perhotelan menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam siklus pembayaran utang *supplier* terletak pada aspek operasional, seperti ketidaklengkapan dokumen pendukung, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya segregasi tugas, serta prosedur otorisasi yang kurang efisien. Temuan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain pengendalian internal dan implementasinya di tingkat operasional. Namun demikian, kajian mengenai pengendalian internal pembayaran utang hingga saat ini sebagian besar masih berfokus pada sektor perhotelan yang memiliki karakteristik transaksi rutin dan tingkat risiko operasional relatif lebih rendah. Sementara itu, kajian serupa pada sektor migas masih terbatas, padahal sektor ini memiliki kompleksitas transaksi, tingkat risiko,

dan tekanan regulasi yang lebih tinggi. Pada sektor migas, khususnya di PT PESF, siklus pembayaran vendor dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, tuntutan kepatuhan terhadap regulasi seperti SKK Migas dan EITI, serta karakteristik kontrak jangka panjang. Dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa lemahnya koordinasi antar fungsi, inkonsistensi dalam proses otorisasi, serta ketidaksesuaian antara kebijakan pembayaran dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan diri untuk mengisi celah penelitian terdahulu dengan mengkaji secara komprehensif efektivitas pelaksanaan pengendalian internal pada siklus pembayaran vendor di sektor migas, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai keandalan dan konsistensi proses pada tingkat operasional perusahaan guna memperluas bukti empiris lintas sektor.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat tata kelola keuangan di PT PESF, mengingat kelemahan pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha dapat berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan, kepatuhan regulasi, serta kepercayaan pemangku kepentingan. Berdasarkan pengalaman dan observasi selama kegiatan magang di fungsi *finance*, masih ditemukan permasalahan seperti ketidakkonsistenan kelengkapan dokumen pendukung, kesalahan input nomor dokumen terutama *invoice*, *human error*, serta kekeliruan transfer pembayaran kepada vendor. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan tingkat kepatuhan dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF, serta mengidentifikasi peluang perbaikan proses guna meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko *fraud*. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengendalian internal dan Kepatuhan dalam Siklus Pembayaran Utang Usaha di PT PESF.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut ini adalah rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF berdasarkan kerangka COSO?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap tingkat kepatuhan dalam proses pembayaran utang usaha di PT PESF?

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF?

1.3 Tujuan Magang

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis penerapan pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF berdasarkan kerangka COSO.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap tingkat kepatuhan dalam proses pembayaran utang usaha di PT PESF.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan dalam siklus pembayaran utang usaha di perusahaan tersebut.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Penulis

1. Menambah wawasan dan pengalaman praktis mengenai penerapan pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha, sehingga penulis dapat memahami kondisi nyata di lapangan.
2. Menjadi sarana untuk mempraktikkan teori-teori akuntansi dan sistem pengendalian internal yang telah dipelajari selama perkuliahan.
3. Membantu penulis memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal dan tingkat kepatuhan pada proses pembayaran utang usaha di perusahaan.
4. Melatih kemampuan analisis, berpikir kritis, serta ketelitian dalam menilai prosedur operasional, sehingga siap menghadapi tantangan profesional setelah lulus.

1.4.2 Bagi Perusahaan

1. Mendapatkan dukungan tenaga kerja yang membantu proses administrasi, dokumentasi, dan analisis terkait siklus pembayaran utang usaha di PT PESF.
2. Memperoleh sudut pandang baru dari peserta magang dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kepatuhan.

3. Menjadi wadah pembinaan sumber daya manusia melalui transfer pengetahuan dan kolaborasi, yang turut berkontribusi dalam menciptakan generasi muda yang kompeten di bidang akuntansi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajemen) dalam mengelola perusahaan. Menurut Wicaksono & Suryandari (2021), *principal* memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada manajemen sebagai *agent* untuk mengelola perusahaan, termasuk tanggung jawab dalam menerbitkan laporan keuangan atas kinerjanya. Namun, hubungan antara *principal* dan *agent* menciptakan perbedaan kepentingan, di mana *agent* menginginkan tingkat keuntungan yang tinggi untuk kinerjanya sementara *principal* menginginkan tingkat pengembalian saham yang tinggi. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi, karena *agent* memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan *principal*, sehingga memberikan celah bagi *agent* untuk menyembunyikan berbagai data yang tidak diketahui *principal* dan mendorong manajemen melakukan praktik kecurangan, termasuk manipulasi laporan keuangan (Wicaksono & Suryandari, 2021). Teori keagenan menguraikan hubungan kontraktual antara manajemen dan pemilik saham, yang menyebabkan konflik kepentingan karena asimetri informasi dan perbedaan tujuan. Sementara agen biasanya mengejar kepentingan pribadinya, direktur berharap untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Konflik keagenan (*agency conflict*) timbul akibat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang salah satunya disebabkan oleh *asymmetric information*, yaitu ketidakseimbangan distribusi informasi antara kedua pihak yang membatasi kemampuan prinsipal dalam memantau dan mengendalikan tindakan agen. Asimetri informasi ini mencakup *adverse selection*, ketika manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan investor, serta *moral hazard*, yaitu kondisi di mana manajer melakukan tindakan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham dan berpotensi menyimpang dari ketentuan kontrak maupun norma etika (Hanifah, 2013). Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Lawrence *et al.*, (2024), landasan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang merujuk pada Jensen dan Meckling (1976) menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan untuk

mengatasi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Penerapan fungsi *monitoring* ini ditujukan untuk mereduksi biaya keagenan dan meminimalkan risiko kerugian (*residual loss*), sehingga dapat memastikan perilaku manajemen berjalan selaras dengan tujuan pemilik demi tercapainya kinerja perusahaan yang optimal. Sistem ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan benar. Dengan demikian, penerapan pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai mekanisme mitigasi konflik keagenan. Mengacu pada pandangan Hendrastuti & Harahap (2023), Teori Agensi menekankan perlunya penyelarasan kepentingan antara prinsipal dan agen melalui kontrak yang efisien untuk meminimalkan perilaku oportunistik. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap pengendalian internal bertindak sebagai sistem *monitoring* yang mengurangi asimetri informasi, sehingga menjamin transparansi pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), di mana berkurangnya risiko *moral hazard* akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan, pada akhirnya, berkontribusi pada efisiensi biaya modal organisasi.

2.1.2 Pengendalian Internal

Pengendalian internal dipahami sebagai salah satu proses yang dilakukan untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai, yang mencakup upaya menjaga aset, menjamin ketelitian dan keandalan informasi akuntansi, mendorong efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan manajemen (Mulyadi, 2017). Senada dengan itu, Rama & Jones, (2011) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar terkait pencapaian tujuan dalam tiga kategori utama, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan merujuk pada definisi tersebut, pengendalian internal pada siklus pembayaran utang usaha dapat dipandang sebagai bagian integral dari sistem yang memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan efektif, informasi keuangan andal, dan seluruh prosedur pembayaran utang mematuhi ketentuan internal maupun regulasi eksternal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain dari suatu entitas, yang

dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan (COSO, 2013). Kerangka ini menekankan lima komponen terintegrasi (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi & Komunikasi, Pemantauan) yang saling bergantung untuk efektivitas pengendalian internal, mendukung tata kelola organisasi dan manajemen risiko secara dinamis (COSO, 2013). Berdasarkan sintesis *Agency Theory*, kerangka COSO, dan praktik siklus pembayaran, pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha merupakan sistem terstruktur yang memastikan proses pembayaran efektif, efisien, didukung informasi keuangan andal, serta patuh terhadap kebijakan internal dan regulasi. Dengan demikian, pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha berfungsi sebagai sistem pengendalian yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan, kelengkapan, dan keandalan proses pembayaran, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pembayaran, dan penyimpangan prosedur. Implementasi pengendalian internal yang efektif diharapkan mampu mendukung kualitas pelaporan keuangan serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

2.1.3 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963). Teori ini menjelaskan bagaimana suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas. Dalam konteks organisasi, kepatuhan merupakan ketaatan entitas terhadap aturan, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan organisasi (Faisal *et al.*, 2021). Ciri utama kepatuhan mencakup kesadaran terhadap ketentuan yang berlaku, pelaksanaan tindakan yang selaras dengan aturan, transparansi dalam proses operasional, serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Menurut Susilo (2017) kepatuhan adalah kesediaan untuk mematuhi batasan-batasan (*boundary*) yang telah ditetapkan, baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun yang bersifat mandiri (*self regulation*). Dalam praktik, “batasan” ini merupakan suatu “kewajiban” yang harus dipenuhi (*compliance obligation*). Contohnya, batasan tentang pembayaran utang usaha, ini sebetulnya adalah kewajiban untuk melunasi tagihan vendor sesuai *terms of payment (TOP)* yang disepakati. Kepatuhan pada tingkat organisasi merujuk pada sejauh mana

perusahaan mematuhi peraturan, standar, dan kebijakan internal, terutama yang berkaitan dengan operasional keuangan. Dalam siklus pembayaran utang usaha, kepatuhan memastikan bahwa setiap pembayaran dilakukan sesuai dengan kontrak, regulasi yang berlaku, ketentuan perpajakan, dan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, kepatuhan dalam siklus pembayaran utang usaha dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu ketepatan waktu pembayaran kepada kreditur, kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung transaksi, serta akurasi pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi. Kurnia Sari *et al.*, (2022) menegaskan bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan hanya dapat dijaga secara konsisten apabila perusahaan memiliki dan menerapkan pengendalian internal yang efektif. Dengan demikian, pengendalian internal yang kuat menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam siklus pembayaran utang usaha.

2.1.4 Siklus Pembayaran Utang Usaha

Siklus pembayaran utang usaha merupakan rangkaian proses yang mengelola utang usaha mulai dari penerimaan *invoice*, verifikasi, persetujuan, hingga pembayaran dan pencatatan transaksi keuangan (Charles T. Horngren *et al.*, 2020). Siklus ini melibatkan berbagai departemen penting, antara lain bagian pembelian, akuntansi, dan bagian keuangan atau *treasury*. Risiko yang umumnya melekat dalam proses ini antara lain keterlambatan pembayaran, risiko pembayaran ganda, dan pembayaran yang tidak sah, yang semuanya harus diminimalisir dengan penerapan pengendalian internal yang efektif dan kepatuhan ketat terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk mengidentifikasi tren dan temuan relevan terkait pengendalian internal dan kepatuhan dalam siklus pembayaran, khususnya di sektor energi. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti meninjau berbagai studi relevan yang menggunakan metode serupa, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif.

Tinjauan literatur dilakukan dengan menyeleksi penelitian-penelitian yang memiliki keterikatan kuat dengan topik yang diangkat. Referensi tersebut diharapkan mampu memberikan dasar konseptual yang selaras, sehingga membentuk kerangka berpikir yang jelas dan konsisten dalam penyusunan penelitian ini. Selain itu, literatur

tersebut berperan sebagai acuan dalam membahas permasalahan penelitian, sehingga analisis dapat lebih terarah dan fokus pada isu yang sedang dikaji. Berdasarkan hasil penelusuran, beberapa penelitian yang dianggap relevan dan mendukung pembahasan ini antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Implementasi Sistem E- <i>Procurement</i> dalam Pendeteksian dan Pencegahan <i>Fraud</i> di PT Pertamina RU VII Kasim Sorong	Banea, A. E., Saerang, D.P.E., & Warongan, J. D.L (2020)	Kualitatif Eksploratif. Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi/	Penerapan sistem <i>E-procurement</i> (yang merupakan hulu dari timbulnya utang usaha) di Pertamina telah sesuai dengan Permen BUMN. Sistem ini efektif mencegah <i>fraud</i> karena membatasi pertemuan fisik vendor dan panitia, namun masih terdapat kendala teknis jaringan internet di area operasional.
2.	Analisis Pengendalian Internal dan KInerja Keuangan Sebelum-Sesudah Pengadaan Tanker MT Sembakung (Studi Kasus Pada PT Pertamina)	Kohar, Y.A., Srihardini, F., dkk. (2025)	Kualitatif (Studi Kasus) & Kuantitatif (Rasio Keuangan) Menggunakan kerangka kerja COSO dan analisis raiso (DER/DAR).	Mengevaluasi pengendalian internal dalam proyek pengadaan dalam proyek pengadaan aset besar yang berdampak pada utang perusahaan. Hasilnya ditemukan bahwa pengendalian internal dalam proyek pengadaan aset (yang menyebabkan utang besar) tidak efektif. Terdapat kelemahan pada kelima komponen COSO, terutama penilaian risiko, yang menyebabkan beban utang perusahaan meningkat tanpa diimbangi efisiensi aset yang optimal.

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Analisis Sistem Pengendalian Internal Prosedur Pengeluaran Kas: COSO ICIF 2013 (Studi pada Perusahaan Konsultan Pertambangan Migas di Yogyakarta)	Zahra, I., Sumayyah, Mubarrok, Z., & Syah , M. E. (2020)	Deskriptif Evaluatif Kualitatif. (Framework COSO 2013)	Menganalisis prosedur pengeluaran kas (pembayaran) di sektor penunjang Migas. Ditemukan bahwa komponenen <i>Control Activities</i> (Aktivitas Pengendalian) sudah baik, namun aspek <i>Risk Assessment</i> masih perlu ditingkatkan untuk mencegah penyelewengan dana dalam pembayaran vendor.
4.	Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Siklus Pengeluaran Kas Untuk Pembayaran Utang Usaha (Studi Pada PT. OYO Rooms Indonesia)	Putra, A. P., & Nuryatno, M. (2022)	Deskriptif Komparatif. Membandingkan praktik perusahaan dengan teori Sistem Akuntansi (Mulyadi).	Sistem pembayaran utang usaha memiliki kelemahan karena fungsi pencatatan utang dan fungsi pembayaran kas berada di tangan yang sama (perangkapan tugas), yang meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan potensi pembayaran ganda (<i>double payment</i>).
5.	<i>Internal Control Analysis of the Vendor Accounts Payable Payment System at Hotel XYZ</i>	Kamelia, A. F., & Nugroho, H. (2025)	Kualitatif Studi Kasus. (Wawancara & Observasi Alur Dokumen)	Mengidentifikasi <i>bottleneck</i> dalam persetujuan pembayaran utang yang menyebabkan keluhan vendor. Penelitian merekomendasikan penyederhanaan alur otorisasi dan penerapan <i>matching document</i> (PO, <i>Invoice</i> , Receiving Report) yang lebih ketat secara digital.

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas yang dijadikan literatur dalam kajian ini menunjukkan adanya variasi fokus, metode, dan konteks pembahasan, sehingga memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis pengendalian internal dan kepatuhan dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF. Penelitian pertama oleh Aprilliyanti Kohar *et al.*, (2025) memberikan gambaran terkini mengenai kondisi di PT Pertamina, di mana ditemukan bahwa pengendalian internal pada proyek pengadaan besar belum efektif akibat kelemahan pada penilaian risiko sesuai kerangka COSO. Temuan ini menjadi rujukan krusial untuk melihat bagaimana tata kelola risiko dalam pengadaan aset berpengaruh langsung terhadap membengkaknya beban utang perusahaan pada objek penelitian saat ini.

Selanjutnya, penelitian (Banea *et al.*, n.d.) memperkuat aspek kepatuhan dengan menganalisis implementasi sistem *e-procurement* di PT Pertamina yang telah sesuai dengan regulasi Menteri BUMN. Meskipun sistem ini efektif mencegah kontak fisik yang berisiko *fraud*, adanya kendala teknis jaringan di area operasional menjadi catatan penting bagi peneliti untuk mengevaluasi apakah kendala serupa menghambat aliran informasi dalam siklus utang usaha di unit Sukowati *Field*. Perspektif prosedur teknis kemudian diperdalam oleh penelitian Pratama (2022) yang menemukan bahwa kerentanan utama dalam siklus pembayaran utang usaha adalah adanya perangkapan fungsi antara bagian pencatatan dan pembayaran, yang berisiko menimbulkan pembayaran ganda (*double payment*).

Penelitian Zahara *et al.*, (2020) yang mengambil objek pada konsultan migas memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai pentingnya *risk assessment* dalam prosedur pengeluaran kas, sejalan dengan karakteristik industri migas yang memiliki risiko transaksi tinggi. Hal ini diperkuat oleh temuan Kamelia & Nugroho (2025) yang mengidentifikasi bahwa keterlambatan pembayaran utang sering kali bukan disebabkan oleh ketersediaan dana, melainkan alur otorisasi yang berbelit dan kurangnya integrasi sistem verifikasi dokumen. Masalah administratif ini merupakan potensi titik lemah yang akan diuji peneliti dalam konteks kepatuhan SOP di PT PESF. Secara keseluruhan, berbagai penelitian terdahulu tersebut memberikan landasan teoretis dan praktis yang kuat mengenai variasi risiko, efektivitas sistem informasi, serta pentingnya kerangka *COSO* dalam menjaga kepatuhan siklus keuangan di sektor migas. Meskipun telah banyak kajian mengenai pengendalian internal di lingkungan PT PESF secara umum,

penelitian ini hadir untuk mengisi celah melalui analisis yang lebih terintegrasi dan spesifik pada unit PT PESF. Dengan memadukan perspektif dari sisi desain prosedur, efisiensi administrasi verifikasi dokumen, hingga mitigasi risiko *fraud*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi komprehensif serta rekomendasi yang tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kepatuhan pada siklus pembayaran utang usaha di unit operasional tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah uraian teori yang berurutan secara sistematis dan dibuat untuk menjadi lebih sederhana dari apa yang peneliti pikirkan untuk membuat penelitian ini. Berikut adalah bagan yang menjelaskan kerangka berpikir penulis:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis ini dipilih bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengendalian internal dan tingkat kepatuhan dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF, tanpa menggeneralisasi ke populasi luas. Studi kasus ini cocok untuk konteks organisasi spesifik seperti perusahaan BUMN sektor migas, dimana peneliti dapat mengamati secara langsung.

Desain ini memungkinkan eksplorasi fenomena kompleks dalam konteksnya yang alami, khususnya hubungan teori agensi yang menjelaskan konflik kepentingan dan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* di tingkat lapangan PT PESF. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana deskripsi proses pembayaran (penerimaan *invoice* hingga pembayaran) diikuti analisis hubungan antara pengendalian internal dan kepatuhan. Paradigma mengadopsi konstruktivisme, di mana pengetahuan dibangun dari pengalaman lapangan magang dan perspektif pelaku proses fungsi *finance* di PT PESF.

3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber dan data penelitian diperoleh langsung dari yang terbagi menjadi dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun pengertian sumber-sumber data tersebut menurut Sugiyono (2013), sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti yang berasal dari pihak yang terkait. Pada penelitian ini nantinya, penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang berkepentingan. serta dokumen internal seperti *invoice* vendor, laporan verifikasi, dan catatan otorisasi pembayaran. Fokus pada siklus utang usaha.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melalui berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek atau lokasi penelitian. Sumber tersebut meliputi hasil studi pustaka, artikel, situs internet, buku referensi,

jurnal ilmiah, majalah, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Pemanfaatan data sekunder dimaksudkan untuk melengkapi informasi peneliti, menguatkan temuan di lapangan, dan meningkatkan tingkat validitas data yang diperoleh.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung objek penelitian menggunakan kelima indra manusia (Morissan *et al.*, 2017). Dalam hal ini untuk memperoleh gambaran atas apa yang terjadi pada perusahaan tersebut. Penelitian ini mengobservasi implementasi pengendalian internal dan kepatuhan dalam siklus pembayaran utang usaha PT PESF, meliputi: (1) proses penerimaan dan verifikasi dokumen (*purchase order, goods receipt, invoice, faktur pajak, berita acara serah terima*), (2) mekanisme pencocokan *three-way matching* (PO-GR-invoice), (3) mengisi excel dan aplikasi internal P2P, (4) Otorisasi dan pemisahan tugas (*procurement, verifikasi, approval* pembayaran), (5) mensubmit lagi ke aplikasi P2P untuk dibayarkan oleh *treasury* setelah di *approve analyst finance*, (6) mengecek nomor MIRO dan nomor *invoice* serta tanggal dibayar pada aplikasi MySAP, dan (7) pengarsipan dokumen.

2. Wawancara

(Sugiyono, 2013) wawancara yang dilakukan dapat berupa *in-depth* atau secara mendalam agar memperoleh informasi yang lengkap. Subjek yang akan diwawancara oleh penulis adalah beberapa karyawan PT PESF PT PESF yang berada pada fungsi *finance*. Lebih utama pada bagian *Account Payable*.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menelusuri, mengelompokkan, dan menyusun secara sistematis berbagai catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumen lain agar peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus yang dikaji serta dapat menyajikan sebagai temuan yang bermakna bagi pihak lain (A. Muri Yusuf., 2014).

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis dilakukan secara terus menerus sejak awal pengumpulan data sampai kegiatan di lapangan berakhir, dengan teknik yang disesuaikan dengan karakteristik data, tujuan penelitian, dan rumusan masalah (A. Muri Yusuf., 2014). Peneliti tidak menunggu seluruh data terkumpul untuk mulai menganalisis, tetapi sejak awal transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen yang diperoleh langsung dibaca, telaah secara kritis, diuji kredibilitasnya, dan diperiksa keabsahannya secara berkesinambungan.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif, sehingga peneliti tidak menggunakan angka untuk menjelaskan fenomena, melainkan menyajikan uraian naratif yang menggambarkan hasil penelitian secara mendalam (Creswell, 2009). Menurut Creswell (2009) pendekatan kualitatif berfokus pada makna yang bersifat khusus dan kontekstual, sehingga penafsiran terhadap data menjadi inti dari proses analisis. Kerangka analisis ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan (Miles *et al.*, 2014), yang saling melengkapi dalam tahapan pengolahan data kualitatif. Dalam setiap tahapan penelitian, Miles *et al.*, (2014) menggunakan langkah-langkah yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Isi data merupakan suatu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, dan pentrasformasian data mentah yang telah dikumpulkan dalam pencatatan lapangan tertulis. Reduksi data terjadi secara berkelanjutan melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Pada tahap ini, peneliti perlu membuat catatan secara teliti dan terperinci karena jumlah data yang terkumpul biasanya sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu, analisis melalui reduksi data harus segera dilakukan. Proses ini mencakup kegiatan merangkum, memilah, serta memusatkan perhatian pada informasi yang paling relevan agar data menjadi lebih terstruktur. Dengan demikian, peneliti lebih mudah dalam mengelola data dan melanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

2. Penyajian Data (*Data Presentation*)

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks uraian. Seiring dengan pendapat Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2013).

3. Penarikan Kesimpulan (*Data Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Dengan begitu data yang sudah diolah melalui reduksi data dan penyajian data disusun serta ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Sementara itu, verifikasi yang dilakukan yaitu dengan cara memikirkan ulang serta penulisan, tinjauan ulang catatan di lapangan, dan bertukar pikiran dengan orang lain (Sugiyono, 2013). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah cara untuk memastikan data atau informasi yang diperoleh benar dan valid dengan melihat dari berbagai sudut pandang, sehingga mengurangi ketidakjelasan dan arti ganda yang mungkin muncul saat data dikumpulkan dan dianalisis (Alfansyur & Mariyani, 2020). Metode ini dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan data yang beragam, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan dua informan yang berbeda, yaitu *Jr. Analyst finance*, dan *Account Payable*. Dari hasil pengumpulan data tersebut, dilakukan pengecekan dengan membandingkan hasil wawancara satu informan dengan hasil wawancara informan lainnya, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, serta data dokumentasi yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Gambaran Umum dan Visi Misi PT PESF



Gambar 4.1 PT PESF

Nama Perusahaan : PT PESF
Alamat : Jl. Lkr. Pertamina, Losari, Sokosari, Kec. Soko, Kabupaten
Tuban, Jawa Timur 62372
Website/Social Media : Instagram: @pepc.p

Dalam perkembangannya, *Field* migas yang bertugas mengelola kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak serta gas bumi di Wilayah Kerja (WK) Tuban telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan struktur kepemilikan saham. Proses ini diawali pada tahun 1988, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Trend International Ltd menandatangani kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract/ PSC*) dengan PT P pada tanggal 29 Februari 1988. Kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan eksplorasi hingga eksploitasi minyak dan gas bumi sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan produksi migas nasional dengan menggunakan nama awal JOB PTT.

Memasuki tahun 1993, terjadi pergeseran struktur kepemilikan pada pihak pengelola lapangan tersebut. Transformasi ini secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal 31 Agustus 1993, menyusul terbitnya surat keputusan dari Direktur Utama PT P yang mengesahkan persetujuan konsesi peralihan hak operasional. Momentum ini menandai berakhirnya masa kepemimpinan *Trend East Java* yang kemudian digantikan oleh Santa Fe Energy Resources Java Ltd. Implikasi dari pergantian kendali ini juga memicu perubahan identitas kemitraan, di mana nama organisasi yang sebelumnya dikenal sebagai JOB PTT resmi bertransformasi menjadi JOB P - Santa Fe Tuban. Tahapan perubahan selanjutnya berlangsung pada tahun 2001, berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT P Nomor 62/C00000/2001-S1 tanggal 2 Juli 2001 serta Surat Direktur PT P Nomor 735/C00000/2001-S1. Kedua surat tersebut menetapkan perubahan nama dari JOB P – Santa Fe Tuban menjadi JOB P – Devon Tuban, yang juga menandai pengalihan fungsi operator dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Pada tahun berikutnya, melalui Surat Direktur Utama PT P Nomor 533/C00000/2002-S1 tanggal 27 Juni 2002 dan Nomor 562/C00000/2002 tanggal 4 Juli 2002, Pertamina secara resmi menetapkan perubahan nama kemitraan menjadi JOB P – *Petrochina East Java*, efektif berlaku mulai 1 Juli 2002. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Direktur Hulu PT P, sejak tanggal 20 Mei 2018 pengelolaan Lapangan Sukowati secara resmi dialihkan dari JOB P-PEJ kepada PT P EP Asset 4. Seiring dengan pengalihan tersebut, entitas pengelola berganti nama menjadi PT PESF yang beroperasi hingga saat ini.

Visi dan Misi

PT PESF merupakan bagian dari PT P EP dan berikut adalah visi dan misinya:

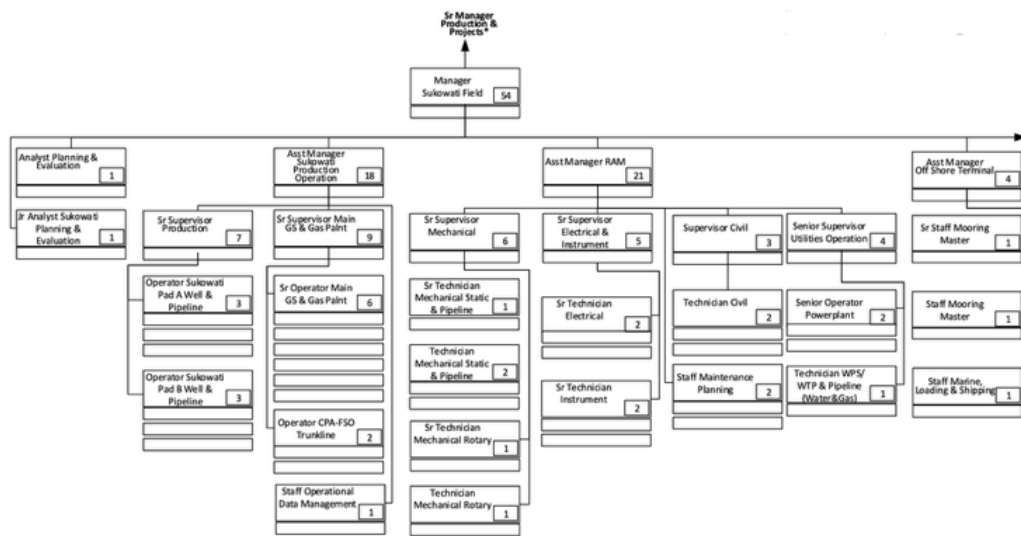
1. Visi

Menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia

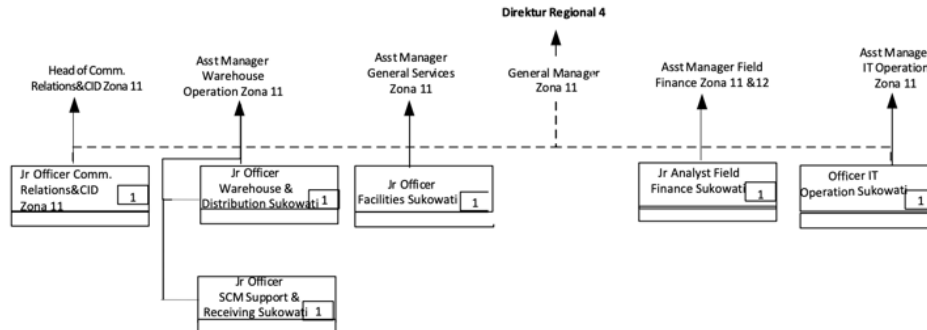
2. Misi

Melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas dengan penekanan pada aspek komersial dan operasi yang baik serta tumbuh dan berkembang bersama lingkup hidup.

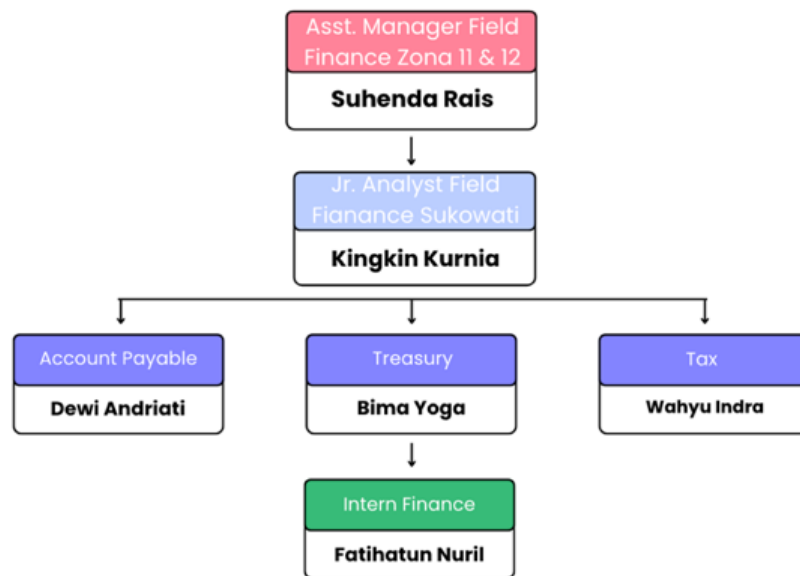
4.1.2 Struktur Organisasi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT PESF



Gambar 4.3 Struktur Organisasi PT PESF



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Fungsi *Finance* PT PESF

Struktur organisasi PT PESF berada di bawah Regional 4 *Subholding Upstream* dan dipimpin oleh *Manager* PT PESF yang bertanggung jawab kepada Senior *Manager Production & Projects*. Dalam pelaksanaannya, struktur organisasi terbagi ke dalam beberapa fungsi utama sebagai berikut:

1. Fungsi Produksi (*Production Operation*): Dipimpin oleh *Assistant Manager Sukowati Production Operation*. Bertanggung jawab atas operasional produksi migas, pengelolaan well (Pad A dan Pad B), gas plant, serta trunkline, termasuk pengendalian data operasional.
2. Fungsi *Reliability, Asset & Maintenance* (RAM): Dipimpin oleh *Assistant Manager RAM*. Mengelola keandalan dan pemeliharaan fasilitas mekanikal, elektrikal, instrumentasi, dan sipil guna menjamin kelancaran operasional produksi.
3. Fungsi *Utilities Operation*: Berada dalam koordinasi RAM. Bertugas mengelola sistem utilitas seperti *power plant*, pengolahan air, dan sistem pendukung lainnya.
4. Fungsi *Off Shore Terminal*: Dipimpin oleh *Assistant Manager Off Shore Terminal*. Bertanggung jawab atas kegiatan *mooring*, *loading*, dan *shipping* hasil produksi melalui terminal laut.
5. Fungsi *Planning & Evaluation*: Dilaksanakan oleh *Analyst* dan *Junior Analyst Planning & Evaluation*. Berperan dalam perencanaan target produksi serta evaluasi kinerja operasional.

6. Fungsi Pendukung (*Support Function*) Zona 11: Meliputi bidang *Communication & CID*, *Warehouse & SCM*, *General Services*, *Field Finance*, dan *IT Operation* yang mendukung kelancaran operasional lapangan.
7. Fungsi *Finance* (*Field Finance* Sukowati): Berada di bawah *Assistant Manager Field Finance* Zona 11 & 12 dan dilaksanakan oleh *Jr Analyst Field Finance*. Terdiri dari subfungsi *Account Payable*, *Treasury*, dan *Tax* yang bertanggung jawab atas pengelolaan pembayaran, kas, dan kewajiban perpajakan.

4.1.3 Tempat dan Waktu Kegiatan

Hari	: Senin s.d Jumat
Waktu	: 4 bulan
Tanggal	: 01 Oktober 2025 - 31 Januari 2026
Tempat	: PT PESF
Bagian Magang	: Fungsi <i>Finance</i>

4.1.4 Data Peserta

Sebagai pelaksana dalam Magang ini adalah

Nama	: Fatihatun Nuril Ulya
NIM	: 22312178
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Bisnis dan Ekonomika
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia Universitas
Semester	: VII (tujuh)

4.2 Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di PT PESF selama periode Oktober 2025 hingga Januari 2026. Selama masa magang, penulis ditempatkan pada fungsi *Finance*, khususnya pada bagian *Account Payable*. Dalam pelaksanaan tugas, penulis membantu proses administrasi pembayaran utang usaha kepada vendor, yang meliputi verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pembayaran serta pengarsipan dokumen pendukung agar proses pembayaran berjalan sesuai dengan prosedur internal perusahaan. Pada hari pertama pelaksanaan magang, penulis mengikuti rangkaian kegiatan cek

kesehatan (*medical waiver*) dan *safety induction*. Kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku di PT PESF. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pemahaman mengenai budaya keselamatan kerja, potensi risiko di lingkungan kerja, serta prosedur keselamatan yang harus dipatuhi selama menjalankan aktivitas magang. Selain kegiatan operasional, penulis juga secara rutin mengikuti kegiatan olahraga pagi yang merupakan bagian dari Program *Wellness* PT P. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dan diikuti oleh karyawan serta peserta magang. Semua karyawan dan peserta magang akan olahraga rutin setiap pagi. Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kebugaran, serta menumbuhkan semangat kerja dan kebersamaan di lingkungan kerja. Pada tahap selanjutnya, penulis mulai dilibatkan dalam proses penerimaan dan verifikasi dokumen pembayaran utang usaha. Dokumen yang diperiksa meliputi SP3, *Purchase Requisition* (PR), *Purchase order* (PO), *Service Acceptance* (SA), *invoice*, kuitansi, faktur pajak, lampiran kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), serta dokumen pendukung lainnya. Penulis membantu melakukan pengecekan kelengkapan dokumen tahap awal serta memastikan kesesuaian antara dokumen pendukung, ketentuan kontrak, dan barang atau jasa yang telah diterima. Setelah proses verifikasi awal, penulis melakukan pencatatan dan rekapitulasi dokumen pembayaran ke dalam *file Microsoft Excel* yang dikenal sebagai *routing slip*. Pencatatan ini berfungsi sebagai langkah awal untuk mempermudah proses penginputan data ke dalam sistem serta sebagai sarana pengendalian dan dokumentasi apabila dokumen diperlukan kembali oleh pihak yang berkepentingan. Tahap berikutnya adalah penginputan data pembayaran ke dalam sistem internal PT PESF, yaitu *Procurement to Pay* (P2P). Penulis melakukan *login* menggunakan akun *Junior Analyst Finance* untuk menginput data pembayaran, seperti nomor *invoice*, nomor bon P2P, data faktur pajak, serta nominal pembayaran. Setelah data memperoleh persetujuan dari *Junior Analyst Finance*, *Account Payable* mengoordinasikan proses lanjutan yaitu *approval* dengan *Senior Analyst Finance* yang berada di zona 11 melalui email untuk melakukan submit data ke sistem P2P. Setelah data disubmit, penulis melakukan pengecekan lanjutan melalui sistem My SAP untuk memastikan keluarnya nomor MIRO, nomor pembayaran, serta tanggal pembayaran. Apabila seluruh informasi tersebut telah muncul di sistem, pembayaran dinyatakan telah diproses oleh bagian *Treasury* pusat atau di regional 2. Selanjutnya, seluruh informasi

pembayaran dicatat kembali ke dalam *routing slip* dan dokumen pendukung discan untuk keperluan pengarsipan fisik dan digital secara tertib dan sistematis. Adapun untuk dokumen yang menggunakan pembayaran dollar ke rupiah, rupiah ke dollar, dollar ke dollar, OTV, Perusahaan PT P akan mendapatkan perlakuan khusus. Dari ketentuan yang sudah disebutkan tadi, untuk proses pembayarannya tidak menggunakan sistem P2P melainkan P *Office*. P *office* (*Pertamina Office*) pada fungsi *Finance*, P-*Office* diterapkan sebagai sarana pendukung administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan dokumen dan alur persetujuan yang berkaitan dengan proses keuangan. P-*Office* digunakan untuk mendistribusikan surat, memo, dan dokumen pendukung transaksi keuangan secara elektronik kepada pihak-pihak yang berwenang. Melalui sistem ini, proses disposisi dan persetujuan dokumen keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penerapan P-*Office* membantu meningkatkan pengendalian internal pada fungsi *Finance* karena setiap dokumen memiliki jejak audit (*audit trail*) yang jelas, mulai dari pengajuan, pemeriksaan, hingga persetujuan akhir. Dengan adanya pengaturan hak akses, kerahasiaan dan keamanan data keuangan juga lebih terjaga, serta mendukung kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan perusahaan. Dalam pelaksanaan proses pembayaran, PT PESF menerapkan prinsip pengendalian internal berupa otorisasi dan pemisahan tugas (*segregation of duties*). Fungsi pengadaan/*User*, verifikasi dokumen, persetujuan pembayaran, dan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh pihak yang berbeda. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan dalam proses pembayaran utang usaha. Selain kegiatan utama pada bagian *Account Payable*, penulis juga mendukung kegiatan administrasi perpajakan yang berada dalam lingkup fungsi *Finance*. Penulis membantu pengelolaan dan pengarsipan dokumen kewajiban perpajakan perusahaan agar tersusun rapi dan siap digunakan untuk keperluan pelaporan maupun pemeriksaan. Kegiatan ini memberikan pemahaman tambahan mengenai peran fungsi pajak dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Di samping itu, penulis juga memperoleh pemahaman mengenai peran *Treasury* di PT PESF. *Treasury* bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi internal, penyusunan jadwal pembayaran operasional, serta pemrosesan pembayaran deklarasi perjalanan dinas dan SP3 pekerja. Selain itu, *Treasury* juga berperan dalam pengelolaan arus minyak dan gas serta proses penagihan penjualan gas agar seluruh kewajiban perusahaan dapat dipenuhi tepat waktu. Di luar kegiatan operasional, penulis

mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi kepedulian kesehatan pekerja, seperti pencegahan kanker dan kampanye donor darah, serta sosialisasi keamanan pekerja terkait pencegahan pelecehan di lingkungan kerja. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kesejahteraan, keamanan, dan lingkungan kerja yang saling menghormati di PT PESF.

4.3 Ketercapaian Aktivitas Magang

Tabel 4.1 Aktivitas Magang

No	Waktu	Aktivitas	Kendala	Hasil
1	1–2 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemeriksaan kesehatan (<i>medical waiver</i>). Mengikuti kegiatan safety induction, serta pengenalan lingkungan kerja dan alur kegiatan magang di PT PESF. 	Tidak terdapat kendala	Memahami standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta memperoleh gambaran umum lingkungan dan budaya kerja perusahaan
2	3–7 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi awal terkait Tugas Akhir (TA) magang dengan SPV. Membantu input dan pengecekan <i>invoice</i>, serta mempelajari proses administrasi keuangan bagian <i>Finance</i> 	Masih dalam tahap penyesuaian dengan sistem dan alur kerja perusahaan	Memahami alur kerja administrasi keuangan dan memperoleh pemahaman awal proses Procure to Pay (P2P)
3	8–14 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan stempel dan pengecekan dokumen faktur dan <i>invoice</i>. Input dokumen (SP3, PR, PO, SA <i>invoice</i>, kuitansi, faktur pajak) ke <i>routing slip</i>, serta pengecekan kelengkapan dokumen pendukung. 	Penulis masih memerlukan arahan dalam memahami detail dokumen keuangan	Memahami jenis dan fungsi dokumen pembayaran serta alur verifikasi dokumen

No	Waktu	Aktivitas	Kendala	Hasil
4	15–17 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> Input NPWP dan nomor faktur pajak, pengecekan faktur pajak melalui <i>website</i> Cortex Input dokumen (SP3, PR, PO, SA <i>invoice</i>, kuitansi, faktur pajak) ke <i>routing slip</i>, serta pengecekan kelengkapan dokumen pendukung. 	Penulis belum terbiasa menggunakan sistem pengecekan faktur pajak	Mampu melakukan pengecekan faktur pajak dan memahami validasi data perpajakan
5	27–31 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan melengkapi dokumen SP3, SA, PO, PR, dan <i>invoice</i> menjadi satu kesatuan. Mengikuti sharing session daring top management. Serta mempelajari profil dan nilai-nilai perusahaan 	Tidak terdapat kendala	Memahami pentingnya kelengkapan dokumen pembayaran dan memperoleh wawasan terkait nilai perusahaan
6	3–7 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> Input dan pengecekan faktur <i>invoice</i>, input data FSA ke <i>routing slip</i> excel. Belajar sistem P2P dan MySAP. 	Penulis masih perlu meningkatkan ketelitian dalam input data	Mampu melakukan input data transaksi secara lebih akurat
7	17–21 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> Input <i>invoice</i>, pengecekan dan stempel dokumen faktur, <i>invoice</i>, dan kwitansi. Mengikuti seminar rutin perusahaan. 	Tidak terdapat kendala	Memahami prosedur administrasi pembayaran dan pentingnya kelengkapan dokumen pendukung
8	24–26 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> Input <i>routing slip</i>, dan dokumen di P2P, mengecek nomor MIRO, serta penggantian nama file dokumen 	Penulis masih menyesuaikan diri dengan sistem MySAP	Memahami keterkaitan antara aplikasi P2P dan MySAP dalam proses pembayaran
9	1–5 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan dan memproses pembayaran deklarasi 	Tidak terdapat kendala	Mampu menjalankan proses administrasi

No	Waktu	Aktivitas	Kendala	Hasil
		perjalanan dinas serta SP3 pekerja. <ul style="list-style-type: none"> • Pengecekan kesesuaian dokumen FSA. • Input bon P2P, mengecek nomor MIRO, serta pengarsipan dokumen 		pembayaran dari tahap verifikasi hingga pencatatan
10	8–12 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Proposal magang dengan SPV • Pengecekan faktur pajak melalui Cortex. • Scan dokumen dan input P2P. • Diskusi terkait PSAK 72 	Penulis masih memerlukan pendalaman materi akuntansi	Memahami keterkaitan PSAK dengan transaksi keuangan perusahaan
11	15–20 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Input nomor MIRO dan scan untuk pengarsipan dokumen. • Serta stempel dokumen faktur pajak 	Tidak terdapat kendala	Terampil dalam proses pengarsipan dan dokumentasi pembayaran
12	22–23 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Review kelengkapan dokumen <i>invoice</i>. • Melengkapi susunan dokumen SP3, SA, PO, PR, dan <i>invoice</i>. • Serta pembuatan deklarasi perjalanan dinas 	Tidak terdapat kendala	Memahami alur akhir proses pembayaran dan dokumentasi administrasi perusahaan
13	29–31 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi kegiatan magang. • Penyusunan laporan tengah magang. • Serta konsultasi sistematika laporan 	Penulis masih menyesuaikan sistematika laporan dengan pedoman kampus	Tersusunnya draft laporan tengah magang
14	2–9 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan narasumber fungsi <i>Finance</i> terkait alur proses review dokumen, pengendalian internal, dan kepatuhan pembayaran vendor, serta pengumpulan data pendukung 	Penyesuaian jadwal dengan narasumber	Memperoleh informasi mendalam sebagai bahan laporan akhir magang

No	Waktu	Aktivitas	Kendala	Hasil
15	12–16 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan analisis laporan akhir magang • Pengolahan data hasil kegiatan dan wawancara. • Serta konsultasi dan revisi laporan 	Masih diperlukan penyempurnaan pengaitan teori dan praktik	Laporan akhir magang tersusun secara sistematis
16	19–23 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi laporan kegiatan magang. • Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. • Serta pembuatan video dokumentasi kegiatan magang 	Penyesuaian konsep video dengan ketentuan institusi	Laporan kegiatan magang dan video magang

4.4 Hasil dan Pembahasan

4.4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan dua informan, yaitu informan 01 merupakan *Junior Analyst Field Finance* dan Informan 02 merupakan staf *Account Payable* pada PT PESF. Wawancara dilaksanakan dalam rentang waktu sembilan hari, yaitu mulai tanggal 2 Januari hingga 9 Januari, dengan penjadwalan yang menyesuaikan kesiapan masing-masing narasumber sehingga tidak dilakukan setiap hari secara berturut-turut. Selama proses wawancara berlangsung, peneliti tetap melaksanakan tugas magang yang diberikan oleh supervisor sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Tema triangulasi dalam penelitian ini berfokus pada sistem dan prosedur pembayaran utang usaha, pengendalian internal, serta koordinasi antar fungsi dalam proses pembayaran di lingkungan Sukowati *Field*.

Tabel Triangulasi

**Tabel 4.2 Penerapan Pengendalian Internal dalam Siklus
Pembayaran Utang Usaha**

No	Tema	Pertanyaan Wawancara	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Kesimpulan
1	Penerapan Pengendalian Internal	Bagaimana alur proses pembayaran utang usaha?	Proses dimulai dari penerimaan <i>invoice</i> , verifikasi dokumen pendukung (PO & BAST), input ke SAP, lalu <i>approval</i> berjenjang sebelum pembayaran.	<i>Invoice</i> diverifikasi kelengkapannya, dicocokkan dengan data sistem, kemudian diproses sesuai tahapan <i>approval</i> hingga pembayaran.	Proses pembayaran dilakukan melalui tahapan verifikasi dokumen dan <i>approval</i> berjenjang dalam sistem atau aplikasi internal PT P.
2	Penerapan Pengendalian Internal	Apa bentuk pengendalian internal dalam setiap tahapan?	Pengendalian melalui pemisahan fungsi, pembatasan akses sistem, dan persetujuan sesuai kewenangan.	Pengecekan dokumen, validasi sistem, serta otorisasi pejabat berwenang sebelum transaksi diproses.	Pengendalian diterapkan melalui verifikasi dokumen, segregasi tugas, dan otorisasi berjenjang.
3	Penerapan Pengendalian Internal	Bagaimana mekanisme pencegahan duplicate payment?	-	Penggunaan <i>routing slip</i> /buku pintar (bentuk Excel) dilakukan untuk memastikan periode penagihan sebelumnya telah diperiksa sebelum data dimasukkan. Risiko penagihan ganda relatif	Duplicate payment dicegah melalui kontrol sistem dan verifikasi manual.

No	Tema	Pertanyaan Wawancara	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Kesimpulan
				kecil karena dokumen asli sudah tersimpan di sistem atau dikuasai perusahaan. Selain itu, terdapat kontrol untuk memverifikasi waktu dan kelengkapan dokumen penagihan terakhir sebelum proses dilanjutkan.	

Tabel 4.3 Struktur dan Pihak yang Terlibat

No	Tema	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Jawaban Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Kesimpulan
1	Struktur & Pihak Terlibat	Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pembayaran?	Pihak yang terlibat dalam proses pembayaran utang usaha di PT PESF terdiri dari tiga fungsi utama. Pertama, <i>user</i> atau fungsi peminta pekerjaan yang menerbitkan dokumen pekerjaan seperti SP3 atau SA, memastikan pekerjaan telah selesai, serta menyiapkan dan mengajukan	Fungsi <i>Finance: Account Payable</i> , Jr. Analyst <i>Field Finance</i> , Asst Manajer <i>Field Finance, Treasury</i> Pusat.	Secara keseluruhan, proses pembayaran utang usaha di Sukowati <i>Field</i> melibatkan tiga fungsi utama yang saling terintegrasi, yaitu <i>user/fungsi peminta pekerjaan, vendor/supplier</i> , dan fungsi <i>Finance. User</i> bertanggung jawab atas penerbitan

No	Tema	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Jawaban Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Kesimpulan
			kelengkapan dokumen pembayaran. Kedua, vendor/ <i>supplier</i> yang menyampaikan <i>invoice</i> beserta dokumen pendukung sesuai ketentuan kontrak. Ketiga, fungsi <i>Finance</i> yang melakukan verifikasi <i>invoice</i> dan kelengkapannya, mencatat transaksi dalam sistem, memonitor proses pembayaran, serta menjalankan otorisasi sesuai batas kewenangan hingga pembayaran direalisasikan.		dokumen pekerjaan serta memastikan kelengkapan dokumen pembayaran, vendor menyampaikan <i>invoice</i> sesuai ketentuan kontrak, sedangkan fungsi <i>Finance</i> —yang mencakup <i>Account Payable</i> , Jr. Analyst <i>Field Finance</i> , Assistant Manager <i>Field Finance</i> , dan <i>Treasury</i> Pusat—melaksanakan verifikasi, pencatatan, pengendalian, serta otorisasi pembayaran hingga dana direalisasikan.
2	Segregation of Duties	Bagaimana pemisahan tugas diterapkan?	Verifikasi, pemrosesan, dan persetujuan dilakukan oleh pihak berbeda.	<i>Account Payable</i> memproses, atasan menyetujui, <i>Treasury</i> pusat membayar.	Terdapat pemisahan tugas yang jelas untuk mencegah konflik kepentingan.
3	Otorisasi	Bagaimana sistem otorisasi diterapkan?	<i>Approval</i> sesuai limit kewenangan jabatan.	<i>Approval</i> sesuai limit kewenangan jabatan	Otorisasi berjenjang sesuai struktur

No	Tema	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Jawaban Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Kesimpulan
					dan nilai transaksi.

Tabel 4.4 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kepatuhan

No	Tema	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Jawaban Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Kesimpulan
1	Kepatuhan SOP	Apakah pembayaran dilakukan sesuai SOP?	Proses pemabayaran mengikuti pedoman dan SOP keuangan perusahaan.	Sistem tidak memungkinkan pembayaran jika dokumen tidak lengkap.	Proses pembayaran telah sesuai dengan SOP.
2	<i>Monitoring</i>	Apakah ada pengawasan terhadap proses pembayaran?	Terdapat <i>monitoring</i> internal dan audit berkala.	-	Pengawasan dilakukan melalui audit dan <i>monitoring</i> rutin.
3	Dampak Pengendalian	Bagaimana pengendalian mempengaruhi kepatuhan?	Setiap transaksi harus memenuhi prosedur sebelum disetujui.	<i>Approval</i> berjenjang meminimalkan risiko pelanggaran.	Pengendalian internal meningkatkan tingkat kepatuhan.

Tabel 4.5 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Internal

No	Tema	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Jawaban Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Kesimpulan
1	Risiko	Apa risiko utama dalam pembayaran utang usaha?	Risiko keterlambatan dokumen dari <i>user</i> atau	Risiko kesalahan input dan	Risiko utama bersifat administratif

No	Tema	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Jawaban Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Kesimpulan
			vendor terkait dan kesalahan administrasi.	keterlambatan <i>approval</i> .	dan koordinatif.
2	Faktor Pendukung	Apa faktor pendukung efektivitas pengendalian?	SOP yang jelas dan sistem pembayaran saling terintegrasi.	SOP yang jelas dan sistem pembayaran saling terintegrasi. Koordinasi antar unit dan pengawasan atasan.	Efektivitas didukung sistem terintegrasi dan struktur jelas.
3	Faktor Penghambat	Apa kendala dalam menjaga kepatuhan?	Keterlambatan dokumen dari fungsi lain.	Koordinasi lintas fungsi memperlambat proses.	Kendala utama berasal dari koordinasi antar fungsi.

4.4.2 Pembahasan Penelitian

PT PESF merupakan unit operasi hulu minyak dan gas bumi di bawah PT P EP, yang merupakan anak perusahaan dari PT P (Persero) melalui *subholding upstream* PT P Hulu Energi. Dalam struktur bisnis PT P, Sukowati *Field* termasuk sektor hulu (*upstream*) yang berfokus pada kegiatan eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi. Di dalamnya terdapat fungsi *Finance* yang mendukung operasional melalui pengelolaan verifikasi dan pembayaran kewajiban, administrasi perpajakan. Perbedaan *finance* di PT PESF dengan *finance* PT P level lain terletak pada hierarki fungsi dan ruang lingkup tanggung jawab. *Finance* di level *Field* berperan sebagai pelaksana dan pengendali transaksi operasional, sedangkan *finance* di level korporat berperan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan strategi keuangan, serta pengambilan keputusan yang berdampak pada keseluruhan entitas usaha.

4.4.2.1 Penerapan Pengendalian Internal dalam Siklus Pembayaran Utang Usaha di PT PESF Berdasarkan Kerangka COSO

Penerapan pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF dianalisis menggunakan kerangka COSO yang terdiri dari lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Utang usaha sebagai salah satu kewajiban perusahaan memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi apabila tidak dikelola secara memadai, terutama berkaitan dengan ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian nilai tagihan, serta kepatuhan terhadap kontrak dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, PT PESF menerapkan sistem pengendalian internal melalui prosedur yang terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi dalam sistem Procure to Pay (P2P) dan MySAP.

Integrasi sistem tersebut memungkinkan setiap tahapan transaksi, mulai dari pengajuan hingga realisasi pembayaran, dapat dilakukan secara sistematis, terkontrol, dan dapat ditelusuri. Selain itu, penerapan mekanisme pembayaran non-tunai melalui transfer bank turut mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama kegiatan magang, implementasi pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF selanjutnya dianalisis berdasarkan kelima komponen dalam kerangka COSO sebagai berikut:

Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Secara umum, lingkungan pengendalian merupakan dasar dari seluruh sistem pengendalian internal yang mencerminkan komitmen manajemen terhadap integritas, nilai etika, struktur organisasi, serta pembagaaian tugas dan tanggung jawab. Pada PT PESF, lingkungan pengendalian dalam siklus pembayaran utang usaha tercermin dari struktur organisasi yang jelas serta keterlibatan berbagai pihak dengan fungsi yang berbeda, yaitu unit operasional (user) sebagai penginisiasi transaksi, vendor sebagai pengaju tagihan, Account Payable (AP) yang melakukan verifikasi administratif, Junior Analyst Finance untuk pengecekan lanjutan dan approval awal, Assistant Manager dan Senior Manager Finance sebagai pemberi persetujuan sesuai batas kewenangan, serta Treasury pusat sebagai pelaksana pembayaran.

Pembagian tugas tersebut menunjukkan penerapan prinsip *segregation of duties*, di mana fungsi pengajuan, verifikasi, persetujuan, dan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh unit yang berbeda sehingga tidak terdapat satu pihak yang mengendalikan seluruh proses. Dalam implementasinya, user menyusun dokumen awal seperti SPK, PR,

PO, SA/GR, dan SP3, lalu AP melakukan verifikasi administratif, dan Treasury pusat mengeksekusi pembayaran. Selain itu, perusahaan telah memiliki pedoman kerja berupa SOP dan Tata Kerja Organisasi (TKO) sebagai acuan operasional. Namun demikian, masih terdapat potensi perangkapan fungsi pada bagian tertentu, khususnya antara Account Payable dan Finance, yang dapat mempengaruhi optimalitas pengendalian internal.

Penilaian Risiko (*risk assessment*)

Penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF, terdapat berbagai risiko yang telah teridentifikasi, antara lain keterlambatan pembayaran kepada vendor, ketidaksesuaian nilai tagihan dengan kontrak atau PO, ketidaklengkapan dokumen, potensi pembayaran ganda, serta kesalahan pencatatan (*human error*).

Untuk memitigasi risiko tersebut, PT PESF menerapkan prosedur pengendalian berlapis yang melibatkan beberapa pihak. Proses diawali dengan pemeriksaan dokumen oleh user sebelum diajukan ke bagian keuangan, kemudian dilakukan verifikasi administratif oleh Account Payable terhadap invoice, PO, dan GR, serta pengecekan lanjutan oleh Junior Analyst Finance sebelum masuk ke tahap persetujuan. Selain itu, penggunaan sistem P2P dan MySAP turut mendukung pengendalian melalui pencatatan transaksi yang terintegrasi dan dapat ditelusuri. Namun demikian, proses penilaian risiko yang dilakukan masih bersifat operasional dan belum terdokumentasi secara formal dalam kerangka manajemen risiko yang komprehensif, sehingga masih terdapat potensi risiko yang bergantung pada ketelitian individu.

Aktivitas Pengendalian (*control activities*)

Aktivitas pengendalian (*control activities*) merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan serta tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan. Di PT PESF, aktivitas pengendalian dalam siklus pembayaran utang usaha dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, mulai dari penerbitan SPK/kontrak oleh user sebagai dasar transaksi, pengajuan invoice oleh vendor, pemeriksaan dokumen oleh user, hingga pembuatan dokumen administrasi seperti PR, PO, SA/GR, BAST, dan SP3 melalui sistem P2P dan MySAP. Selanjutnya,

dilakukan verifikasi oleh Account Payable, input dan pembuatan Invoice ID dalam sistem, serta proses approval berjenjang oleh Junior Analyst Finance dan Assistant Manager/Senior Manager sebelum dilakukan monitoring melalui MySAP (MIRO) dan eksekusi pembayaran oleh Treasury pusat, yang diakhiri dengan pengarsipan dokumen oleh fungsi Finance.

Bentuk pengendalian yang diterapkan dalam proses tersebut meliputi otorisasi berlapis sesuai batas kewenangan, pencocokan dokumen (invoice, PO, dan GR/SA), pemisahan fungsi antara verifikasi dan pelaksanaan pembayaran, pembatasan akses dalam sistem, serta penggunaan sistem terintegrasi yang mendukung keterlacakan transaksi. Selain itu, pencatatan melalui routing slip digunakan sebagai alat monitoring untuk meminimalkan risiko kesalahan, termasuk potensi pembayaran ganda. Dengan demikian, aktivitas pengendalian di PT PESF telah dirancang untuk memastikan setiap transaksi diverifikasi secara memadai sebelum pembayaran dilakukan.

Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Informasi dan komunikasi (*information and communication*) merupakan komponen yang memastikan bahwa data yang relevan tersedia dan disampaikan kepada pihak yang membutuhkan secara tepat waktu. Di PT PESF, sistem P2P dan MySAP berfungsi sebagai media utama dalam pengelolaan informasi pembayaran utang usaha, di mana seluruh transaksi dicatat secara real-time, sistematis, dan dapat ditelusuri. Informasi terkait invoice, nomor PO, nilai tagihan, hingga status pembayaran dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai dengan hak akses masing-masing.

Komunikasi antar unit kerja, seperti antara user, Account Payable, dan Finance, dilakukan secara berkelanjutan baik melalui sistem maupun media lain seperti email, terutama dalam proses approval dan klarifikasi dokumen. Alur komunikasi ini mendukung kelancaran proses pembayaran serta memastikan setiap pihak memperoleh informasi yang dibutuhkan. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masih terdapat kendala koordinasi antar fungsi yang dapat mempengaruhi kecepatan proses pembayaran, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen dari vendor maupun user.

Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan (*monitoring*) merupakan proses evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal yang dilakukan secara berkelanjutan. Pada PT PESF, kegiatan monitoring dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, antara lain supervisi oleh atasan dalam setiap tahapan proses, pengecekan status pembayaran melalui sistem MySAP, serta pelaksanaan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) secara berkala. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui audit internal dan eksternal, serta melibatkan pihak eksternal seperti SKK Migas dan BPKP.

Pengawasan tersebut menunjukkan adanya sistem monitoring yang berlapis, baik secara internal maupun eksternal, sehingga mendukung pengendalian yang lebih efektif. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan, seperti ketergantungan pada kelengkapan dokumen serta potensi *human error*, yang dapat mempengaruhi optimalitas pelaksanaan pengendalian internal.

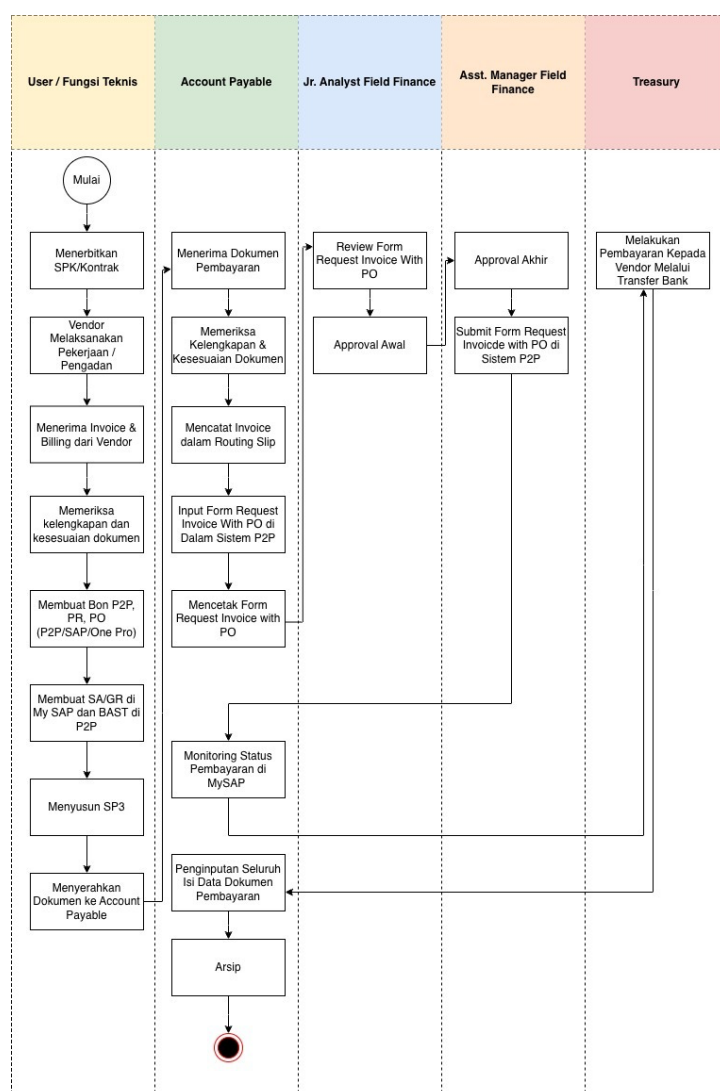
Berdasarkan uraian pada komponen pemantauan (*monitoring*) tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT PESF telah memiliki sistem pengendalian internal yang terstruktur dan terintegrasi dalam siklus pembayaran utang usaha. Kelima komponen dalam kerangka COSO saling mendukung dalam memastikan bahwa proses pembayaran dilaksanakan sesuai prosedur, terdokumentasi dengan baik, serta mampu meminimalkan risiko yang dapat terjadi. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi pengendalian tersebut, selanjutnya diuraikan alur aktivitas pembayaran utang usaha di PT PESF sebagai bentuk penerapan pengendalian internal dalam praktik operasional.

Dalam praktik operasional, proses pembayaran utang usaha di PT PESF dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang terintegrasi, dimulai dari penerbitan SPK/kontrak sebagai dasar transaksi, pengajuan *invoice* oleh vendor, pemeriksaan dokumen oleh *user*, hingga proses administrasi melalui sistem P2P dan MySAP. Pada tahap verifikasi, Account Payable menerapkan mekanisme pengendalian preventif dengan memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan *three-way matching* antara *invoice*, PO, dan dokumen penerimaan (SA/GR atau BAST) sebagai titik kontrol utama untuk menjamin validitas transaksi.

Seluruh proses pembayaran terintegrasi dalam sistem internal perusahaan, sehingga transaksi tidak dapat diproses apabila terdapat ketidaksesuaian data, kesalahan kode akun, atau perbedaan nominal. Sistem ini berfungsi sebagai alat kontrol otomatis

yang mampu meminimalkan risiko pembayaran tidak sah, pembayaran ganda, maupun kesalahan pencatatan. Meskipun demikian, pengendalian berbasis sistem tetap memerlukan pengawasan manusia, khususnya dalam tahap input data.

Proses persetujuan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan batas kewenangan, sehingga tidak terdapat satu pihak yang memiliki otoritas penuh atas seluruh proses. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *segregation of duties* yang bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pelaksanaan ICoFR dan audit internal secara berkala menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak hanya dirancang dan dijalankan, tetapi juga dievaluasi secara sistematis untuk memastikan efektivitasnya.



Gambar 4.5 Flowchart Aktivitas Pembayaran Utang Usaha

Secara keseluruhan, penerapan pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam kerangka COSO. Kelima komponen pengendalian internal saling terintegrasi dan mendukung dalam memastikan bahwa setiap tahapan proses pembayaran dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh desain sistem yang telah memadai, tetapi juga oleh kualitas implementasi di lapangan, khususnya dalam hal konsistensi pelaksanaan, koordinasi antar fungsi, serta ketelitian dalam pengelolaan dokumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat implementasi pengendalian internal agar tujuan pengendalian, seperti keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap prosedur, serta perlindungan aset perusahaan, dapat tercapai secara optimal.

4.4.2.2 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Tingkat Kepatuhan dalam Proses Pembayaran Utang Usaha di PT PESF

Berdasarkan rumusan masalah kedua, pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap tingkat kepatuhan dalam proses pembayaran utang usaha di PT PESF. Kepatuhan yang dimaksud mencakup kepatuhan terhadap prosedur operasional, batas kewenangan, ketentuan kontraktual, serta prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku. Dalam proses pembayaran utang usaha di PT PESF, pengendalian internal memiliki peran strategis dalam menjaga tingkat kepatuhan terhadap prosedur operasional, batas kewenangan, serta peraturan tata kelola perusahaan yang berlaku. Melalui pengendalian internal yang memadai, setiap tahapan pembayaran dapat dilakukan secara terstruktur sehingga risiko kesalahan prosedur maupun penyimpangan dapat diminimalkan. Pentingnya pengendalian internal dalam menjaga kepatuhan terhadap prosedur organisasi juga dijelaskan dalam penelitian terkait sistem pengadaan pada perusahaan BUMN. Banea *et al.*, n.d. menyatakan bahwa Penggunaan sistem berbasis teknologi juga terbukti dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses administrasi keuangan. Penelitian mengenai implementasi sistem *e-procurement* pada PT P RU VII Kasim menunjukkan bahwa penerapan sistem elektronik dalam proses pengadaan barang

dan jasa mampu meningkatkan transparansi serta membantu mendeteksi dan mencegah potensi *fraud* dalam transaksi perusahaan.

Sejalan dengan temuan tersebut, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sistem pengendalian dalam proses pembayaran utang usaha di PT PESF tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terintegrasi melalui berbagai mekanisme pengendalian. Mekanisme tersebut meliputi proses verifikasi berlapis, pemanfaatan sistem atau aplikasi internal perusahaan seperti MySAP dan P2P, penerapan persetujuan berjenjang sesuai dengan batas kewenangan, serta kegiatan pemantauan melalui *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR). Integrasi berbagai mekanisme tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam memastikan bahwa proses pembayaran utang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Struktur pengendalian ini secara langsung mempengaruhi perilaku kepatuhan pihak yang terlibat dalam siklus pembayaran utang perusahaan. Konsistensi dalam memastikan bahwa semua dokumen lengkap sebelum pembayaran diproses menunjukkan kemampuan administrasi. Mekanisme penyesuaian *three-way matching* antara *invoice*, *Purchase order (PO)*, dan dokumen penerimaan pekerjaan (SA/GR/BAST) memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan kontrak dan peraturan internal perusahaan. Sistem mencegah pembayaran yang tidak sah dengan mengembalikan *invoice* atau dokumen lain yang tidak lengkap atau tidak sesuai prosedur untuk diperbaiki. Karena proses pembayaran tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan dokumentasi yang telah ditetapkan, kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kepatuhan prosedural. Pengendalian internal mempengaruhi kepatuhan terhadap batas kewenangan selain kepatuhan administratif. Jumlah kebebasan individu dalam memproses pembayaran dibatasi oleh struktur otorisasi berjenjang yang didasarkan pada nilai transaksi. Transaksi tertentu hanya dapat disetujui oleh pejabat yang memiliki batas kewenangan sesuai dengan struktur organisasi, dan tanpa persetujuan tersebut, transaksi tidak dapat dilakukan. Karena setiap persetujuan dicatat dalam sistem dan membentuk audit trail yang dapat ditelusuri kembali, mekanisme ini meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pengendalian internal dapat

dilihat dalam kepatuhan perusahaan terhadap *Term of Payment (TOP)* yang ditetapkan, yaitu 30 hari. Transaksi dapat dipantau melalui sistem SAP untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan pembayaran, yang mengurangi kemungkinan denda atau komplain dari vendor. Dengan demikian, pengendalian internal memastikan legalitas transaksi dan kepatuhan waktu dan kinerja operasional.

Pelaksanaan *Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)* yang dilakukan setiap bulan meningkatkan fungsi pengawasan. Proses pengecekan dan *upload* sampel dokumen melalui *website* khusus ICoFR digunakan dalam mekanisme ini untuk memastikan dokumen lengkap, persetujuan yang sesuai dengan kewenangan, dan kepatuhan terhadap Tata Kerja Organisasi (TKO) dan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Selain itu, audit internal berkala meningkatkan kemungkinan menemukan ketidaksesuaian. *Monitoring* teratur meningkatkan standar prosedur dan meningkatkan kepatuhan organisasi.

Dari perspektif Agency Theory, pengendalian internal berfungsi sebagai cara untuk mengurangi asimetri informasi dan risiko moral antara agen dan *principal*. Mengingat bahwa fungsi *Field Finance*, *Account Payable*, dan *Treasury* terpisah satu sama lain, dan bahwa ada persetujuan berjenjang dan riwayat audit dalam sistem, individu tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengontrol seluruh proses pembayaran. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang teratur dapat mengurangi risiko perilaku oportunistik dan *agency cost* dalam organisasi.

Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan Teori Kepatuhan. Ada dua cara untuk menjelaskan Teori Kepatuhan yaitu, normatif dan instrumental. Menurut Teori Kepatuhan, pendekatan instrumental menekankan kepatuhan karena ada sistem pengawasan dan konsekuensi pelanggaran. Sementara itu, pendekatan normatif menekankan kepatuhan karena kesadaran akan legitimasi aturan. Praktik di PT PESF menunjukkan keduanya. Karena transaksi tidak dapat diproses jika tidak sesuai prosedur, sistem aplikasi internal (P2P & MYSAP) dan ICoFR membuat kontrol formal yang mendorong kepatuhan secara instrumental. Sebaliknya, budaya kerja yang menekankan kepatuhan terhadap prosedur

operasional standar (SOP) dan tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa prinsip kepatuhan telah diinternalisasi secara normatif.

Secara keseluruhan, pengendalian internal dalam proses pembayaran utang usaha di PT PESF memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan tingkat kepatuhan, baik dalam aspek administratif, batas kewenangan, ketepatan waktu pembayaran, maupun keandalan pelaporan keuangan. Integrasi antara mekanisme pengendalian formal, pemanfaatan teknologi informasi, serta struktur organisasi yang jelas tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan. Namun demikian, efektivitas pengendalian tersebut tetap bergantung pada konsistensi implementasi dan kualitas pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.

4.4.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Internal dan Kepatuhan dalam Pembayaran Utang Usaha

Berdasarkan rumusan masalah ketiga, pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal serta tingkat kepatuhan dalam proses pembayaran utang usaha di PT PESF. Efektivitas pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh desain sistem yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, sistemik, dan perilaku organisasi. Efektivitas pengendalian internal dan tingkat kepatuhan dalam proses pembayaran utang usaha di PT PESF dipengaruhi oleh banyak faktor struktural, sistemik, dan perilaku organisasi. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi dan sistem. Aprilliyanti Kohar *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa, Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pengendalian internal dalam proyek pengadaan tidak efektif, ditunjukkan oleh kelemahan pada kelima komponen COSO, terutama dalam penilaian risiko terkait kegagalan mitra dan aktivitas pengendalian dalam mekanisme pembayaran. Ada beberapa komponen utama yang memengaruhi optimalisasi pengendalian dan kepatuhan, menurut hasil wawancara dan analisis praktik yang berjalan. Pertama, integrasi teknologi dan kualitas sistem informasi sangat penting. Sistem terintegrasi MySAP dan *Procure-to-Pay* (P2P) meningkatkan transparansi dan

mengurangi risiko manipulasi data. Mereka juga memungkinkan transaksi terdokumentasi secara sistematis, membentuk audit trail, dan membatasi proses tanpa persetujuan yang sah. Namun, kinerjanya masih bergantung pada ketepatan input data dan pengetahuan pengguna tentang fitur sistem. Akurasi pencatatan dan ketepatan waktu pembayaran dapat dipengaruhi oleh kesalahan input atau pengunggahan dokumen yang terlambat. Kedua, untuk menjaga proses tetap independen, pemisahan fungsi, atau pembagian tugas, sangat penting. Kemungkinan penyalahgunaan wewenang dibatasi oleh mekanisme *check and balance* yang ada di antara fungsi operasional, *Account Payable*, *Jr Field finance*, dan *Treasury*. Struktur ini tidak hanya sejalan dengan prinsip pengendalian yang terkandung dalam kerangka COSO, tetapi juga membantu dalam mengurangi risiko *agency problem*. Namun, kinerja pemisahan fungsi sangat bergantung pada konsistensi penggunaan dan kepatuhan terhadap batas kewenangan yang telah ditetapkan. Ketiga, keberhasilan pengendalian internal bergantung pada sumber daya manusia yang kompeten. Meskipun sistem telah dirancang secara terstruktur, verifikasi dokumen dan analisis kewajaran transaksi masih membutuhkan ketelitian dan pemahaman teknis dari personel. Selain sistem, kesadaran individu tentang pentingnya tata kelola dan kepatuhan terhadap SOP dan TKO menentukan tingkat kepatuhan. Dalam Teori Kepatuhan, faktor ini dikaitkan dengan pendekatan normatif, di mana kepatuhan muncul dari internalisasi nilai dan profesionalisme. Keempat, efektivitas pengendalian juga dipengaruhi oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala. Ini termasuk pelaksanaan audit internal secara berkala dan *Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)* setiap bulan. *Monitoring* teratur mendorong disiplin prosedur dan meningkatkan kemungkinan penemuan ketidaksesuaian. *Website ICoFR* memiliki sistem pelaporan yang meningkatkan fungsi pengawasan. Dari sudut pandang *instrumental compliance*, lebih banyak kemungkinan untuk diawasi dan konsekuensi dari pelanggaran akan mendorong orang untuk lebih patuh terhadap aturan. Kelima, faktor luar yang memengaruhi seberapa efektif proses pembayaran adalah dokumen yang dibuat oleh *user* dan vendor harus tepat dan lengkap. Backlog dan keterlambatan pemrosesan pembayaran dapat terjadi karena ketidaksesuaian atau keterlambatan dokumen. Meskipun pengendalian internal

dimaksudkan untuk menolak dokumen yang tidak sesuai, kinerja sistem masih bergantung pada input awal yang baik dari pihak terkait. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai sistem pengendalian internal prosedur pengeluaran kas yang menunjukkan bahwa koordinasi antar bagian, identifikasi risiko, serta kejelasan prosedur pembayaran menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan (Zahara *et al.*, 2020). Keenam, budaya kepatuhan organisasi dan dukungan manajerial memengaruhi konsistensi pelaksanaan pengendalian. Lingkungan pengendalian yang baik dihasilkan dari komitmen manajemen terhadap tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap batas kewenangan, dan tanggapan terhadap hasil audit. Tanpa dukungan tersebut, pengendalian formal berpotensi menjadi sekadar prosedur administratif tanpa efektivitas substantif. Secara keseluruhan, sistem, struktur organisasi, sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, dan budaya kepatuhan memengaruhi tingkat pengendalian internal dan kepatuhan pembayaran utang usaha PT PESF. Desain prosedur dan konsistensi pelaksanaan menentukan pengendalian internal yang kuat. Oleh karena itu, agar pengendalian tetap efektif, diperlukan sistem yang baik, struktur organisasi yang jelas, dan komitmen individu terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan observasi yang telah dilakukan mengenai pengendalian internal dan kepatuhan dalam siklus pembayaran utang usaha di PT PESF, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pengendalian Internal dengan mengimplementasi pengendalian internal dalam siklus pembayaran utang usaha telah berjalan secara sistematis dan terstruktur. Proses ini mencakup mekanisme *three-way matching* (mencocokkan *invoice*, *Purchase order*, dan dokumen penerimaan barang/jasa) untuk memastikan keabsahan transaksi. Selain itu, penggunaan sistem terintegrasi seperti MySAP, P2P, dan P-Office berfungsi sebagai kontrol otomatis yang meminimalisir risiko kesalahan manual.
2. Perusahaan telah menerapkan prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*) yang jelas antara fungsi pengajuan (*user*), verifikasi (*Account Payable*), dan persetujuan (Manajemen/*Finance*). Tidak ada satu pihak pun yang memiliki otoritas penuh dari awal hingga akhir proses, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang dapat ditekan.
3. Jika ditinjau berdasarkan kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), penerapan pengendalian internal di PT PESF telah mencerminkan lima komponen utama pengendalian internal, yaitu *control environment*, *risk assessment*, *control activities*, *information and communication*, serta *monitoring*. Penerapan komponen tersebut terlihat melalui struktur organisasi yang jelas, proses verifikasi dokumen yang sistematis, penggunaan sistem informasi terintegrasi, serta pelaksanaan *monitoring* melalui *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) dan audit internal secara berkala.
4. Pengendalian internal memiliki peran strategis dalam menjaga tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan tata kelola perusahaan. Adanya mekanisme verifikasi berlapis dan sistem *approval* berjenjang memastikan bahwa setiap pembayaran dilakukan sesuai dengan batas kewenangan dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan

terhadap *Term of Payment* (TOP) 30 hari juga terjaga dengan baik melalui pemantauan sistem SAP.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas:

- a. Faktor Pendukung: Dukungan sistem aplikasi internal perusahaan (P2P, MySAP, P-Office) yang terintegrasi, komitmen manajemen melalui *approval* berjenjang, serta pemantauan rutin melalui *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR).
- b. Faktor Penghambat (Risiko): Potensi *human error* dalam input data, ketergantungan pada kelengkapan dokumen dari pihak ketiga (*vendor/user*), serta risiko kesalahan klasifikasi biaya (*cost recovery*) yang kompleks dalam industri migas.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengendalian internal dalam proses pembayaran utang usaha di PT PESF berperan signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap prosedur, batas kewenangan, dan ketentuan tata kelola perusahaan. Selain itu, efektivitas pengendalian internal dipengaruhi oleh faktor sistem informasi, pemisahan fungsi, kompetensi sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, serta budaya kepatuhan organisasi. Hasil ini memberikan implikasi praktis bagi perusahaan, khususnya fungsi keuangan dan manajemen, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pembayaran utang usaha.

Pertama, karena sistem terintegrasi seperti MySAP, *Procure to Pay* (P2P), dan P-Office terbukti berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan, maka perusahaan perlu terus mengoptimalkan pemanfaatan sistem tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas input data, penyempurnaan fitur sistem, serta pelatihan pengguna agar mampu memanfaatkan sistem secara maksimal. Optimalisasi sistem akan berdampak langsung pada peningkatan akurasi data dan efisiensi proses pembayaran.

Kedua, penerapan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dan mekanisme *approval* berjenjang terbukti mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga konsistensi penerapan batas kewenangan serta

memastikan bahwa setiap proses persetujuan dilakukan secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Penguatan fungsi pengendalian ini akan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan proses keuangan.

Ketiga, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme karyawan melalui pelatihan, pembinaan, serta penguatan pemahaman terhadap SOP dan Tata Kerja Organisasi (TKO). Peningkatan kompetensi ini akan berdampak pada kualitas verifikasi dokumen dan ketepatan pengambilan keputusan.

Keempat, mekanisme pengawasan melalui *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) dan audit internal terbukti mendukung peningkatan kepatuhan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa proses monitoring dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, serta diikuti dengan tindak lanjut atas temuan audit. Penguatan fungsi pengawasan ini akan membantu dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Kelima, faktor koordinasi antar pihak, termasuk *user*, vendor, dan fungsi keuangan, juga memengaruhi kelancaran proses pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi antar unit kerja untuk memastikan kelengkapan dokumen dan meminimalkan keterlambatan proses pembayaran.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, yaitu:

1. Penelitian dilakukan dalam ruang lingkup satu unit perusahaan (PT PESF), sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada perusahaan lain dengan karakteristik yang berbeda.
2. Data yang digunakan sebagian besar diperoleh melalui observasi dan wawancara selama kegiatan magang, sehingga terdapat kemungkinan subjektivitas dalam interpretasi data.

3. Penelitian ini tidak menggunakan metode kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, sehingga tidak memperoleh data kuantitatif yang dapat mengukur secara lebih luas persepsi responden terkait efektivitas pengendalian internal dan tingkat kepatuhan.
4. Penelitian lebih berfokus pada pendekatan kualitatif, sehingga belum mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas pengendalian internal maupun tingkat kepatuhan secara statistik.
5. Akses terhadap data tertentu, khususnya yang bersifat sensitif atau strategis, terbatas sehingga analisis belum mencakup seluruh aspek secara menyeluruh.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penyempurnaan proses di masa mendatang:

1. Peningkatan ketelitian input data yaitu dengan mengingat masih adanya risiko *human error* dan kesalahan administratif dalam proses verifikasi, perusahaan perlu melakukan sosialisasi berkala atau pelatihan penyegaran bagi staf terkait pentingnya akurasi data sebelum diinput ke dalam sistem MySAP dan P2P.
2. Optimalisasi digitalisasi dokumen, untuk mengatasi kendala keterlambatan dokumen pendukung dari vendor atau *user*, perusahaan disarankan untuk mempercepat inisiatif pengembangan *Super Apps* dan *Shared Service Finance (SSF)* guna menciptakan proses yang lebih transparan dan terdigitalisasi secara menyeluruh di semua perusahaan PT P.
3. Pejabat berwenang diharapkan tetap konsisten dalam melakukan penelaahan secara substantif terhadap dokumen tagihan, tidak hanya sekadar formalitas administratif, guna memastikan setiap biaya yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan.
4. Mengingat ketergantungan pada sistem aplikasi, perusahaan perlu memastikan infrastruktur pendukung (listrik dan internet) tetap stabil untuk menghindari hambatan pada proses input dan *approval* transaksi yang bersifat mendesak.
5. Koordinasi yang baik antara *user*, vendor, fungsi *Account Payable*, serta unit keuangan lainnya perlu terus ditingkatkan agar kelengkapan dokumen dan proses administrasi dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan keterlambatan dalam proses pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.
- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Aprilliyanti Kohar, Y., Srihardini, F., Anugrah Ramadhan, N., Azzahra, F., & Negeri Makassar, U. (2025). Analisis pengendalian internal dan kinerja keuangan sebelum-sesudah pengadaan tanker MT Sembakung (Studi kasus pada PT Pertamina). *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 6(4). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jaa>
- Banea, A. E., Saerang, D. P. E., & Warongan, J. D. L. (n.d.). Analisis Implementasi Sistem E-procurement Dalam Pendeteksian Dan Pencegahan Fraud Di PT. Pertamina RU VII Kasim Sorong. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 11(1).
- Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, & Madhav V. Rajan. (2020). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis (17th Edition)* (17th ed.). Pearson.
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework Executive Summary Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*.
- Creswell, J. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Devine Cons. (2025). *How to Navigate Oil and Gas Industry Accounting*. <https://Devineconsultingllc.Com/How-to-Navigate-Oil-and-Gas-Industry-Accounting/>.
- Dunia Energi. (2026). *Value Chain Pertamina Tinggi karena Kuasai Rantai Bisnis Gas Nasional*. <https://Www.Dunia-Energi.Com/Value-Chain-Pertamina-Tinggi-Karena-Kuasai-Rantai-Bisnis-Gas-Nasional/>.
- Faisal, F., Abidin, Z., & Haryanto, H. (2021). Enterprise risk management (ERM) and firm value: The mediating role of investment decisions. *Cogent Economics and Finance*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2009090>
- Hanifah. (2013). *Pengaruh struktur corporate governance terhadap earnings management*.
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency Theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>

- Herry. (2011). *Akuntansi : Aktiva, Utang, dan Modal*. Penerbit Gava Media.
- Indonesia -, P. E., & Team, R. (2024). *Oil and Gas in Indonesia: Investment, Taxation and Regulatory Guide 2024*. www.pwc.com/id
- Kamelia, A. F., & Nugroho, H. (2025). *Internal control analysis of the vendor accounts payable payment system at Hotel XYZ*.
- Kurnia Sari, R., Fatma Wati, F., Ayu Lestari, T., & Abriana Anggraini, R. (2022). Pemanfaatan Software Accurate 5 Untuk Pengolahan Data Transaksi Keuangan Rumah Produksi Tas Inoe. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 2(1), 9–17. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika9>
- Lawrence, R. T., Wafa, Z., Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, P., & Mercubuana Yogyakarta, U. (2024). *The influence of good corporate governance on environmental, social, and governance disclosure and the performance of coal mining companies listed on the IDX for the 2021–2023 period*.
- L&G Insurance Broker. (2024, December 6). *Menavigasi Resiko Industri Migas: Tantangan, Peluang, dan Solusi 2025*. <https://Lngrisk.Co.Id/Menavigasi-Resiko-Industri-Migas-Tantangan-Peluang-Dan-Solusi-2025/>.
- Miles, M. B., Saldana, J., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Morissan, M. A., Andy Corry Wardhan, & Farid Hamid U. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Penerbit Salemba.
- Ni Luh Febri Mahendri, I Putu Arnawa, & Ni Made Sri Rukmiyati. (2025). Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Pembayaran Utang *Supplier* di Hotel Courtyard By Marriott Bali Nusa Dua Resort. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(4), 496–501. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i4.7777>
- Pertamina Training & Consulting (PTC). (2025). *Kick Off PGTC 2025: Kolaborasi Strategis untuk Talenta Energi Masa Depan*.
<https://Pertamina-Ptc.Com/Berita/Read/Kick-off-Pgtc-2025-Kolaborasi-Strategis-Untuk-Talenta-Energi-Masa-Depan>.
- Pratama, A. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Siklus Pengeluaran Kas Untuk Pembayaran Utang Usaha (Studi Pada Pt. Oyo Rooms Indonesia). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(08), 697–711. <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i08.1101>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.

- Rama, D. V., & Jones, F. L. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat.
- Rofyanto Kurniawan, & Hidayat Amir. (2017). *Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas* (Ph. D. & H. A. Rofyanto Kurniawan, Ed.; 1st ed.).
- Setyawati, N. M. A., Damayanti, T., & Mareni, N. K. (2024). Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Pembayaran Utang *Supplier* di Hotel XYZ. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 12(690–712).
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilo, L. J. (2017). *Governance, Risk Management, and Compliance*. Penerbit PT. Grasindo.
- Wicaksono, A., & Suryandari, D. (2021). Accounting Analysis Journal The Analysis of *Fraudulent Financial Reports Through Fraud Hexagon on Public Mining Companies*. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 220–228. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i3.54999>
- Zahara, I., Sumayyah, Mubarrok, Z., & Syah, M. E. (2020). Analisis sistem pengendalian internal prosedur pengeluaran kas: COSO ICIF 2013. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 188–200. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v5i1.1448>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Curriculum Vitae (CV)



FATIHATUN NURIL ULYA

Alamat: Yogyakarta
Nomor: 085225042642
Email: fattihatunnurilya@gmail.com
Linkedin: <http://linkedin.com/in/fatihatur-nuril-ulya-753a9a2a0>

RINGKASAN

Fatihatur Nuril Ulya adalah mahasiswa tingkat akhir Program Studi Akuntansi dengan minat yang kuat di bidang akuntansi, keuangan, administrasi bisnis, dan perpajakan. Ia memiliki pengalaman magang langsung di divisi keuangan dan akuntansi, dengan fokus pada administrasi keuangan, verifikasi dokumen, pengolahan data, invoicing dari vendor, serta pengelolaan dokumen perpajakan seperti faktur pajak.

Ia selalu antusias untuk mempelajari hal-hal baru, mengembangkan keterampilan, dan mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan kerja, khususnya dalam bidang akuntansi manajerial, pengendalian internal, dan perpajakan.

PENGALAMAN

Finance & Accounting Intern

Okt 2025 - Jan 2026

PT Pertamina EP

- Melakukan proses invoicing dari vendor serta memastikan kesesuaian data dengan dokumen pendukung.
- Mengelola dan memverifikasi dokumen faktur pajak sebagai bagian dari proses perpajakan perusahaan.
- Menyusun dan memproses routing slip perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan internal perusahaan.
- Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebelum proses pembayaran, meliputi dokumen perpajakan, slip perjalanan dinas, SP3, invoice dari vendor, serta dokumen pendukung lainnya.
- Membantu memastikan kepatuhan administrasi keuangan dan perpajakan sesuai dengan prosedur dan kebijakan perusahaan.

Project-Based-Virtual-Intern: Big Data Analyst X Kimia Farma

Feb 2025 - Mar 2025

PT. Kimia Farma, Tbk

- Mengimpor dataset ke dalam BigQuery untuk analisis data.
- Membuat analisis tabel berdasarkan dataset yang telah diimpor.
- Mengembangkan dashboard kinerja untuk analisis kimia farmasi.
- Menggunakan BigQuery untuk mengelola dan menganalisis tabel data skala besar.
- Menggunakan Looker Studio untuk membangun dan memvisualisasikan dashboard interaktif.

Tax Intern, HTC Training & Consulting

Jun 2024 - Jun 2024

HTC Training & Consulting

- Menyusun laporan pajak penghasilan pribadi.
- Menyusun laporan pajak penghasilan Pasal 21.
- Menyusun SPT PPh Pasal 23.
- Menyusun laporan pajak pertambahan nilai (PPN) secara berkala.
- Menyusun laporan pajak penghasilan badan tahunan.

PENDIDIKAN

S1- Akuntansi

Ags 2022 - Sekarang

Universitas Islam Indonesia

- **IPK:** 3.60/4.00
- **Mata Kuliah yang Relevan:** Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajerial, Audit & Jaminan, Perpajakan, Keuangan Perusahaan, Akuntansi Biaya, Analisis Laporan Keuangan, Integrasi Proses Bisnis SAP.

Jurusan MIPA

Jun 2019 - Jun 2022

MAN 1 Bojonegoro

- **Pelajaran yang Relevan:** Matematika, Ekonomi, Bahasa Inggris, Dll.

INFORMASI TAMBAHAN

- **Bahasa:** Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris.
- **Sertifikasi:** Brevet Pajak A&B, Certificate of Participation- Introduction to SAP S/4HANA using Global Bike Inc., Certified Forensic Auditor Cluster 1
- **Penghargaan/Kegiatan:** Finalist OCB Fest oleh Accounting Study Program.
- **Ketrampilan Teknis:** Akuntansi Pajak, Akuntansi Keuangan, Manajemen Material, ERP SAP, Keterampilan Analitis, Analisis Data, Visualisasi Data.
- **Perangkat Lunak:** Microsoft Office, Canva, SPSS, Google BigQuery, Figma, SAP S/4 HANA, SAP Analytic Cloud (SAC)

Lampiran 2. Hasil wawancara

A. Profil dan Latar Belakang Perusahaan

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1.	Dapatkah bapak/ibu menjelaskan secara singkat tentang profil PT PESF ?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Tuban mengalami beberapa kali perubahan nama dan operator. Awalnya pada tahun 1988, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan melalui kontrak bagi hasil antara PT P dan Trend International Ltd dengan nama JOB PTT. Selanjutnya, pada tahun 2001 terjadi perubahan menjadi JOB P–Devon Tuban seiring pengalihan fungsi operator. Pada tahun 2002, kemitraan kembali berganti nama menjadi JOB P–Petrochina East Java. Sejak 1 Maret 2018, pengelolaan Lapangan Sukowati dialihkan kepada P EP Asset 4, dan hingga saat ini beroperasi dengan nama PT PESF EP Asset 4 PT PESF.
2.	Apa saja kegiatan utama atau core business yang dilakukan di Sukowati <i>Field</i> ?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Pelaksanaan kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan awal migas, serta pemeliharaan fasilitas operasi di wilayah kerjanya. Produk yang dihasilkan adalah crude oil (minyak mentah) dan natural gas. Meskipun yang signifikan adalah oil.
3.	Bagaimana peran Sukowati <i>Field</i> dalam struktur organisasi PT PESF EP secara keseluruhan?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Sejak tahun 2020, PT P (Persero) melakukan restrukturisasi organisasi dengan membentuk <i>subholding</i> berdasarkan kesamaan core business. Untuk sektor hulu migas, seluruh entitas yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas dikelompokkan ke dalam <i>Subholding Upstream</i> , yang berada di bawah PT P Hulu Energi (PHE). Secara struktur, PT P, PT PESF berada di bawah PT P EP (PEP), dan PEP sendiri berada di bawah <i>Subholding Upstream</i> (PT P Hulu Energi). Dengan demikian, Sukowati <i>Field</i> merupakan bagian dari lini bisnis hulu yang fokus pada kegiatan produksi minyak dan gas.

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<p>Dalam periode yang sama, <i>Subholding Upstream</i> juga dibagi menjadi beberapa regional untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, khususnya dalam aspek budgeting, pengawasan, serta koordinasi operasional. Pembagian regional tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regional 1 (Sumatera): PT P Hulu Rokan (PHR) • Regional 2 (Jawa): PT P EP (PEP) • Regional 3 (Kalimantan): PT P Hulu Indonesia (PHI) • Regional 4 (Indonesia Timur): PT P EP Cepu (PEPC) • Regional 5 (Internasional): PT P Internasional EP (PIEP) <p>Sukowati <i>Field</i> termasuk dalam Regional 4 (Indonesia Timur) yang dikelola oleh PT P EP Cepu (PEPC). Walaupun secara struktur korporasi tetap berada di bawah PT P EP, dalam hal operasional tertentu seperti budgeting dan human capital, Sukowati <i>Field</i> mengikuti koordinasi Regional 4.</p> <p>Di bawah Regional 4, terdapat beberapa wilayah kerja yang dikelola, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT P EP <i>Field</i> Cepu • PT P EP PT P • PT P EP <i>Field</i> Poleng <p>Selain itu, terdapat juga wilayah kerja yang dikelola oleh entitas lain dalam <i>subholding</i>, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PHE Randu Gunting • PHE Tuban East Java (TEJ) • PHE West Madura Offshore (WMO) • Jambaran Tiung Biru (JTB)
4.	Apa visi dan misi utama dari Pertamina PT PESF?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	<p>Visi: Menjadi unit operasi hulu migas yang unggul, andal, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional.</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi secara optimal, efisien, dan berwawasan lingkungan. • Menjaga keselamatan kerja, kesehatan, dan perlindungan

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<p>lingkungan (HSSE) dalam seluruh aktivitas operasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta kepatuhan terhadap regulasi. • Mendukung pencapaian target produksi PT P EP dan nasional melalui inovasi dan peningkatan kinerja operasional. • Berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah di sekitar wilayah operasi.
5.	Bagaimana struktur kepemilikan atau hubungan dengan unit lain dalam PT PESF EP?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Sudah terjawab di nomor 3

B. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1.	Bagaimana struktur organisasi di PT PESF disusun?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	<p>Secara hierarkis, struktur Sukowati <i>Field</i> adalah sebagai berikut:</p> <p>PT P (Persero)</p> <p>↓</p> <p><i>Subholding Upstream</i> (PT P Hulu Energi)</p> <p>↓</p> <p>PT P EP (PEP)</p> <p>↓</p> <p>Pertamina PT PESF</p>
2.	Dapatkah dijelaskan bagaimana pembagian tanggung jawab antar bagian, terutama terkait keuangan dan pengadaan?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Pembagian tugas dibagi sesuai kontribusi adapun, tugasnya adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICT: Pengelolaan sistem IT, jaringan, dan keamanan data perusahaan. • RAM: Pemeliharaan dan memastikan keandalan peralatan produksi. • HSSE: Pengawasan keselamatan kerja, keamanan, dan kepatuhan lingkungan. • <i>Production Operation</i> (PO): Operasi dan <i>monitoring</i> produksi minyak dan gas harian. • Offshore: Pengelolaan kegiatan produksi di fasilitas lepas pantai.

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<ul style="list-style-type: none"> • SCM: Pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan kontrak vendor. • Human Capital (HC): Pengelolaan SDM, administrasi, dan pengembangan karyawan. • Petroleum Engineering (PE): Analisis reservoir dan perencanaan optimasi produksi. • Work Over Well Services (WOWS): Perbaikan dan perawatan sumur untuk menjaga/meningkatkan produksi. • Legal and Relation (LR): Pengelolaan aspek hukum dan hubungan dengan stakeholder. • <i>Finance</i>: Pengelolaan transaksi keuangan, verifikasi dan pembayaran utang usaha (AP), serta pelaporan dan <i>monitoring</i> keuangan sesuai ketentuan perusahaan dan prinsip tata kelola.
3.	Siapa saja pihak atau fungsi yang terlibat dalam proses pembayaran utang usaha?	Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Pihak atau fungsi yang terlibat dalam proses pembayaran utang usaha di Sukowati <i>Field</i> meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>User/Fungsi Peminta Pekerjaan</i>: Menerbitkan dokumen pekerjaan (misalnya SP3/SA), memastikan pekerjaan selesai, serta mengajukan kelengkapan dokumen pembayaran. • <i>Vendor/Supplier</i>: Mengirimkan <i>invoice</i> beserta dokumen pendukung sesuai ketentuan kontrak. • <i>Fungsi Finance</i>: yang mencakup verifikasi dokumen <i>invoice</i> dan kelengkapannya, pencatatan transaksi dalam sistem, pengendalian dan <i>monitoring</i> pembayaran, serta pelaksanaan otorisasi sesuai batas kewenangan yang berlaku hingga pembayaran dilakukan.
4.	Apakah terdapat fungsi audit internal di Sukowati <i>Field</i> ? Jika ada, bagaimana koordinasinya?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	<p>ADA. diibaratkan kita punya banyak stakeholder karena kita BUMN yang bersinggungan dengan pemerintahan, masyarakat, audit eksternal pun ada. kita juga punya stakeholder namanya SKK Migas jadi selain di bawah kementerian BUMN atau sekarang</p>

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			nomen klaturnya adalah Danatara kita juga dibawahnya SKK migas Jadi audit internal itu sangat penting untuk memastikan proses bisnis di Pertamina sendiri Apakah sudah sesuai prosedur dan governance yang baik Terus, apakah ada potensi <i>fraud</i> , gitu-gitu Jadi, sering sih disunat itu ada auditor internal dari Regional 4 itu untuk memastikan governance kenapa udah dijaga dengan benar.
5.	Bagaimana sistem pelaporan dan alur pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional?		Sistem pelaporan dan pengambilan keputusan operasional di Sukowati <i>Field</i> menerapkan mekanisme berjenjang, berbasis data, dan sesuai limit kewenangan. Proses ini memastikan setiap keputusan didukung analisis teknis dan finansial yang memadai, terdokumentasi dalam sistem, serta diawasi melalui fungsi pengendalian internal. Maka demikian, kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan perusahaan.

C. Sistem Keuangan dan Proses Pembayaran

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1.	Apa sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan pembayaran utang usaha?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Nah, kalau di <i>Field</i> sendiri, khususnya di <i>Field finance</i> tidak memprovide laporan keuangan. Yang memprovide laporan keuangan adalah orang reporting regional 2 atau PT P EP sendiri. Nah, karena kayak yang tadi karena wilayah kerja EP itu banyak dan kita tuh hanya dibagi per <i>Field</i> gitu jadi untuk data pendapatan beban itu langsung dikonsolidasi oleh PT P EP Pusat atau yang berada di regional 2, cuma berhubung kayak budgeting itu ada di regional 4, jadi kita tidak memprofit laporan realisasi. Yang ngasih laporan realisasi adalah regional 4, cuma kadang perlu konfirmasi ke kita gitu Kenapa kok bulan ini RKAP dan

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<p>realisasinya naiknya signifikan gitu-gitu, perbedaannya gitu. Nah, sama itu. Kalau untuk laporan yang kita terbitkan itu sebenarnya laporan EP21 dan 22. Atau laporan produksi minyak dan gas. Jadi yang pertama kali itu biasanya kita minta data dari orang produksilah. Produksi gasnya berapa MGS, terus oilnya berapa barel, gitu kan. Abis itu kita compile, kita kirimkan ke Orang Revenue. Nah Orang Revenue tuh ada di regional 4. Dan nanti juga akan diteruskan ke SKK migas. Ya paling itu Backlog. Kayak outstanding penyelesaian beban di utang, piutang dan pembayaran.</p> <p>Jadi kan sebenarnya di SAP itu kita dapat proyeksikan ya, misalnya nih untuk pembayaran itu harusnya 30 hari udah kelar, tapi pas kita tagih report-nya ternyata lebih dari 3 bulan. Berarti yang kelebihan 3 bulan itu, itu dinamakan backlog. Jadi kita perlu konfirmasi, jangan-jangan karena ada revisi, jangan-jangan karena ada dokumen yang belum lengkap. Dan itu kan salah satu key performance-nya PEP ya, bahwa semua transaksi gitu-gitu harus diselesaikan sesuai timenya. Paling dulu sih yang PPN itu juga kita laporkan untuk dikliring oleh regional 2.</p>
2.	Bagaimana alur umum proses pembayaran utang usaha di sini? Mulai dari pengajuan hingga pelunasan/pembayaran?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • SPK/Kontrak Proses diawali dengan penerbitan SPK oleh <i>user</i> sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian awal bahwa pekerjaan telah disetujui pihak berwenang. • Pengajuan <i>Invoice</i> oleh Vendor Vendor mengajukan <i>invoice</i>

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<p>beserta dokumen pendukung sesuai ketentuan kontrak setelah pekerjaan selesai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan oleh <i>User</i> <i>User</i> memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen tagihan dengan pekerjaan atau barang yang diterima. • Input Sistem P2P, SAP, One Pro Jika sesuai, <i>user</i> membuat dokumen administrasi (PR, PO, Bon P2P) melalui sistem untuk memastikan transaksi tercatat dan terdokumentasi. • SA/GR dan BAST <i>User</i> membuat Service Acceptance (SA)/<i>Good Receipt</i> (GR) di MySAP dan BAST di P2P sebagai bukti penerimaan barang/jasa. • SP3 (Permintaan Proses Pembayaran) <i>User</i> menyusun SP3 sebagai dasar formal pengajuan pembayaran ke fungsi <i>Finance</i>. • Penyerahan ke <i>Finance</i> (AP) Dokumen lengkap diserahkan ke <i>Account Payable</i> untuk diproses lebih lanjut. • Verifikasi oleh <i>Account Payable</i> AP memeriksa kesesuaian nilai, kontrak, PO, identitas vendor, faktur pajak, dan dokumen pendukung sebagai bentuk pengendalian internal. • Pencatatan <i>Routing slip</i> Data tagihan dicatat dalam <i>Routing slip</i> (Excel) untuk <i>monitoring</i> proses pembayaran. • Input <i>Form Request Invoice with</i> PO (P2P) AP menginput data untuk menerbitkan <i>Invoice ID</i>

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<p>sebagai identitas transaksi dalam sistem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review dan <i>Approval Junior Analyst</i> melakukan pengecekan, kemudian diajukan <i>approval</i> ke <i>Assistant Manager Finance</i> Zona 11 sesuai kewenangan. • Submit di Sistem P2P Setelah disetujui, form disubmit menggunakan akun pejabat berwenang sebagai penerapan segregation of duties. • <i>Monitoring</i> di MySAP (MIRO) AP memonitor status pembayaran melalui nomor MIRO untuk memastikan nomor dan tanggal pembayaran telah tercatat. Akses terbatas pada akun berotorisasi. • Pembayaran oleh <i>Treasury</i> Eksekusi pembayaran dilakukan oleh fungsi <i>Treasury</i> di kantor pusat melalui transfer bank. Pemisahan AP dan <i>Treasury</i> memperkuat pengendalian internal dan keamanan transaksi.
3.	Siapa yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan persetujuan pembayaran?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Jr <i>Field Finance</i> merupakan verifikator dokumen masuk <i>finance</i>. kalau misalnya <i>invoice</i> itu dari vendor, itu dibantu dari <i>Account Payable</i>, jadi dia kayak verifikasi awal juga gitu lah. Terus untuk deklarasi dan SP3 Pekerja, itu dibantu <i>Treasury</i> Internal sebagai verifikator awal gitu lah. lalu Jr <i>Filed Finance</i> Tanda Tangan <i>approval</i> atas keabsahan dokumen. kalau ada yg salah akan dikembalikan. Lalu selanjutnya <i>approval</i> dari Asst <i>Manager Filed Finance</i> baru</p>

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			akan diproses pembayaran oleh <i>treasury</i> pusat.
4.	Bagaimana hubungan antara bagian keuangan dengan bagian pengadaan dan operasional dalam proses pembayaran ini?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Hubungan antara bagian <i>finance</i> dan fungsi lain dalam proses pembayaran bersifat saling bergantung dan berurutan (end-to-end process control). Masing-masing memiliki tugas berbeda namun terintegrasi dalam satu siklus transaksi.
5.	Apakah ada standar atau pedoman khusus yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembayaran (misalnya SOP atau kebijakan internal)?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Ada. Dan di EP itu ketentuannya lumayan banyak. Jadi biasanya ini juga udah tertuang di kontrak, di lampiran C, atau cara/pedoman pembayaran gitulah. Dan kita juga biasanya juga mengedukasi <i>user</i> terkait, kalau dokumen apa aja sih sebelum mengirim <i>invoice</i> ke <i>finance</i> . Kayak misalnya ada bon <i>user</i> , ada SP3, ada PR, PO, SA, ada <i>invoice</i> itu sendiri, ada faktor pajak, kuitansi, BASTP, terus laporan pekerjaan, laporan TKDN, lampiran kontrak, bank garansi, surat perintah kerja atau SPK, itu laporan PPN. Dan di sukowati sendiri harus diserahkan ke <i>finance</i> dalam bentuk hardfile.
6.	Apakah terdapat SOP tertulis khusus untuk proses pembayaran utang usaha? Bagaimana tingkat kepatuhannya di lapangan?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Ada. Sudah terjawab di nomor 5. Tingkat kepatuhan sangat patuh dan mentaati semua aturannya.
7.	Bagaimana mekanisme pengendalian untuk mencegah kesalahan pembayaran (overpayment, duplicate payment) atau pembayaran kepada vendor yang tidak sah?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Mekanisme pengendalian dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi berlapis oleh <i>Account Payable</i>, termasuk pengecekan kesesuaian <i>invoice</i> dengan kontrak dan PO. • Penerbitan <i>Invoice</i> ID dalam sistem P2P, sehingga setiap tagihan memiliki identitas unik dan terdokumentasi.

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring</i> melalui MySAP (MIRO) untuk memastikan status dan nomor pembayaran tercatat dengan benar. • Pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>) antara <i>Junior Analyst</i> dan <i>Assistant Manager</i> dalam proses <i>approval</i>. • Pemisahan fungsi AP dan <i>Treasury</i>, di mana AP hanya memverifikasi dan mengadministrasikan, sedangkan pembayaran dilakukan oleh <i>Treasury</i> pusat. • Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening vendor yang terdaftar dalam kontrak, sehingga mencegah pembayaran kepada pihak yang tidak sah. • Penginputan <i>Routing slip</i>/Buku Pintar. Untuk mencegah Double Payment. Karena semua data dan waktu pembayaran di catat di situ.
8.	Jika terjadi temuan kesalahan atau ketidaksesuaian dokumen, bagaimana prosedur tindak lanjutnya?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	<p>Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen saat verifikasi di fungsi <i>Finance (Account Payable)</i>, maka dokumen tidak langsung diproses. Tindak lanjut yang dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen dikembalikan kepada <i>user</i> untuk diperbaiki atau dilengkapi. • <i>User</i> berkoordinasi kembali dengan vendor apabila terdapat kekurangan pada <i>invoice</i> atau dokumen pendukung. • Perbaikan harus sesuai dengan ketentuan kontrak dan pedoman yang berlaku sebelum dapat diajukan kembali ke <i>Finance</i>. <p>Selain itu, untuk mencegah kesalahan berulang, perusahaan</p>

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			melakukan sosialisasi ketentuan melalui diskusi kontrak, broadcast email, dan forum internal, agar <i>user</i> dan vendor memahami kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

D. Peraturan dan Kepatuhan Umum

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1.	Sejauh mana perusahaan menerapkan kebijakan kepatuhan (compliance policy) dalam kegiatan operasionalnya?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Perusahaan telah menerapkan kebijakan kepatuhan secara formal melalui pedoman dan tata kelola yang berlaku dalam kegiatan operasional. Salah satu contohnya adalah pedoman bantuan fasilitas dinas pekerja yang mengatur agar klaim perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam proses pembayaran <i>invoice</i> , kepatuhan juga diterapkan melalui persyaratan kelengkapan dokumen sebelum dapat diproses oleh <i>Finance</i> . Ketentuan tersebut disosialisasikan pada saat diskusi kontrak atau ketika akan dilakukan kontrak baru, sehingga <i>user</i> dan vendor memahami standar administrasi yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kepatuhan diimplementasikan melalui pengaturan prosedur, persyaratan dokumen, dan pengendalian administratif.
2.	Apakah ada unit khusus yang menangani aspek kepatuhan dan tata kelola perusahaan?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Ya, terdapat fungsi khusus yang menangani aspek kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Pengawasan dilakukan melalui sistem internal seperti <i>Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR) dan audit internal yang memantau kesesuaian transaksi dengan TKO dan batas kewenangan. Selain itu, terdapat pengawasan dari Regional 4 dan Pertamina EP Pusat dalam hal <i>approval</i> dan konsolidasi laporan keuangan, serta pengawasan eksternal dari SKK Migas dan BPKP. Dengan

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			demikian, fungsi compliance dan governance dijalankan secara berlapis dan terintegrasi dalam sistem pengendalian internal perusahaan.
3.	Bagaimana bentuk pelatihan atau sosialisasi kepatuhan bagi pegawai?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Sosialisasi kepatuhan dilakukan melalui beberapa media, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Broadcast email, yang berisi himbauan dan informasi terkait keamanan siber, keselamatan kerja, keselamatan berkendara, kesehatan (misalnya first aid), kebakaran, serta kebijakan internal lainnya. • Sosialisasi langsung atau forum khusus, di mana pegawai diundang untuk mengikuti penjelasan secara tatap muka. • Dalam beberapa kegiatan, dilakukan juga praktik langsung, sehingga pemahaman menjadi lebih efektif dibandingkan hanya melalui email.
4.	Apa tantangan utama dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Tantangan utama dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal adalah risiko human error dalam verifikasi dan input data, serta ketergantungan pada kelengkapan dokumen dari <i>user</i> maupun <i>vendor</i>. Selain itu, kompleksitas klasifikasi pembayaran terutama terkait cost recovery, berpotensi menimbulkan kesalahan jika tidak dicermati dengan baik. Keterlambatan penyelesaian dokumen juga dapat menyebabkan backlog dan berdampak pada indikator kinerja. Di sisi eksternal, tuntutan kepatuhan terhadap regulasi SKK Migas dan hasil audit BPKP menuntut ketelitian tinggi dan dokumentasi yang sangat lengkap.</p>
5.	Bagaimana mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran kebijakan atau	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Mekanisme pelaporan atas pelanggaran kebijakan atau ketidaksesuaian prosedur dilakukan secara berjenjang dan terdokumentasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pembayaran, biasanya pihak</p>

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
	ketidaksesuaian prosedur?		terkait terlebih dahulu akan dipanggil oleh <i>Field Manager</i> untuk klarifikasi. Tahap ini bersifat pembinaan dan evaluasi internal, namun dapat berdampak pada penilaian kinerja atau karier apabila kesalahan dinilai serius. Setelah itu, ada juga temuan akan diproses melalui mekanisme pengendalian seperti <i>monitoring Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR) bulanan atau audit internal. Jika pelanggaran bersifat material atau berdampak signifikan, laporan diteruskan ke level regional atau pusat (Regional 2/P EP Pusat) untuk evaluasi lebih lanjut dan penetapan tindakan korektif. Seluruh proses tetap terdokumentasi dalam sistem sebagai bagian dari penguatan kepatuhan dan pencegahan berulangnya pelanggaran.

E. Pengendalian Internal dalam Siklus Pembayaran

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1.	Apa saja kontrol internal utama yang diterapkan dalam setiap tahap siklus pembayaran utang usaha (misalnya verifikasi <i>invoice</i> , matching dokumen)?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Kontrol internal utama dalam siklus pembayaran utang usaha meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen berlapis oleh <i>Account Payable</i>, termasuk pengecekan kesesuaian <i>invoice</i> dengan kontrak, PO, serta kelengkapan dokumen pendukung. • Matching dokumen (<i>invoice-PO-SA/GR-BAST</i>) sebelum pembayaran diproses. • Pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>) antara pihak yang menginput, mereview, dan meng-approve transaksi. • Pembatasan otorisasi sistem, di mana hanya akun tertentu yang dapat mengakses dan memproses transaksi (misalnya MIRO di SAP). • <i>Monitoring</i> melalui sistem P2P dan MySAP untuk memastikan

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<p>setiap transaksi memiliki <i>Invoice</i> ID dan terdokumentasi dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan <i>Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR) setiap bulan, dengan <i>upload</i> sampel <i>invoice</i> untuk memastikan kepatuhan terhadap TKO, kelengkapan dokumen, serta otorisasi yang sesuai.
2.	Bagaimana mekanisme segregasi tugas (Segregation of duties) dalam proses pembayaran untuk mencegah penyalahgunaan?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Mekanisme segregation of duties dalam proses pembayaran diterapkan dengan pemisahan fungsi yang jelas antara pihak yang mengajukan, memverifikasi, menyetujui, dan mengeksekusi pembayaran.</p> <p>Pertama, bagian operasional atau <i>user</i> mengonfirmasi bahwa pekerjaan/barang telah diterima. Kedua, <i>Account Payable</i> (AP) memproses input transaksi ke dalam sistem internal Pertamina P2P dan MYSAP. Ketiga, fungsi keuangan (Jr <i>Field Finance</i>) melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Keempat, pejabat otorisasi (<i>Assistant Manager</i> atau <i>Senior Manager</i> Regional 4 sesuai batas nilai) memberikan <i>approval</i>. Terakhir, fungsi <i>Treasury</i> melakukan eksekusi pembayaran.</p> <p>Dengan pemisahan ini, tidak ada satu pihak yang mengendalikan seluruh proses dari awal hingga akhir. Setiap tahapan saling mengawasi (cross-check) dan terdokumentasi dalam sistem internal Pertamina dan MYSAP, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan, manipulasi data, maupun konflik kepentingan.</p>
3.	Apakah ada prosedur rekonsiliasi rutin untuk memastikan akurasi pembayaran utang	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2	<p>Pengendalian rutin dilakukan melalui mekanisme <i>Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR) setiap bulan. Dalam</p>

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
	usaha? Jika iya, seberapa sering dilakukan?	(<i>Account Payable</i>)	proses ini, dilakukan pengecekan sampel transaksi untuk memastikan dokumen lengkap, <i>approval</i> berjalan sesuai kewenangan, dan pencatatan telah sesuai prosedur. Sistem pelaporan dilakukan melalui <i>website</i> khusus ICoFR. Selain itu, terdapat pengawasan melalui audit internal yang dilakukan dua kali dalam setahun, meskipun waktunya tidak selalu tetap dan dapat bersamaan dengan audit eksternal.
4.	Bagaimana sistem otorisasi dan <i>approval</i> dilakukan pembayaran diatas nilai tertentu?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Transaksi di bawah Rp2,5 miliar cukup di-approve oleh <i>Assistant Manager Finance</i> . Transaksi di atas Rp2,5 miliar harus memperoleh <i>approval</i> dari Senior <i>Manager Finance</i> Regional ⁴ . Pengaturan ini memastikan adanya pengendalian berjenjang sesuai prinsip <i>delegation of authority</i> dan pengendalian internal.
5.	Apa indikator kinerja (KPI) yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengendalian internal dalam proses pembayaran?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Efektivitas pengendalian internal dalam proses pembayaran tidak hanya diukur dari ketepatan waktu pembayaran, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap SOP, kualitas kelengkapan verifikasi dokumen, minimnya kesalahan transaksi, serta rendahnya risiko <i>fraud</i> dan temuan audit. Kombinasi KPI kuantitatif dan indikator kepatuhan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai seberapa kuat sistem pengendalian internal berjalan dalam siklus utang usaha.

F. Risiko dan Masalah dalam Proses Pembayaran

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1.	Apa resiko utama yang sering muncul dalam siklus pembayaran utang usaha di Sukowati <i>Field</i> ?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2	Risiko utama dalam siklus pembayaran utang usaha di Sukowati <i>Field</i> berkaitan erat dengan core business produksi minyak dan gas, khususnya crude oil yang menjadi produk dominan. Industri migas

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
		(Account Payable)	<p>bersifat high risk, high capital, high technology, dan high manpower, sehingga berdampak langsung pada karakter transaksi vendor. Beberapa risiko utama yang muncul adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko nilai transaksi yang besar (materiality risk) Kegiatan produksi dan pengembangan migas membutuhkan biaya besar, baik Capital Expenditure (Capex) maupun Operational Expenditure (Opex). Nilai transaksi dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah (misalnya Capex eksplorasi/pengembangan bisa ±100 miliar). Nilai yang signifikan ini meningkatkan risiko kesalahan pencatatan atau pembayaran. 2. Risiko kesalahan klasifikasi biaya (cost allocation risk) Karena sebagian besar biaya dapat diklaim sebagai cost recovery, terdapat risiko kesalahan pengkategorian antara biaya yang cost recoverable dan non-cost recoverable. Kesalahan ini berdampak langsung pada laporan laba rugi (PNL). 3. Risiko kompleksitas dokumen dan kontrak Bisnis migas melibatkan teknologi tinggi dan banyak vendor spesialis, sehingga kontrak dan dokumen pendukungnya kompleks. Hal ini meningkatkan risiko ketidaksesuaian dokumen saat proses verifikasi <i>invoice</i>. 4. Risiko volume dan signifikansi transaksi vendor Sebagai wilayah kerja yang berada dalam sistem ring fencing dan bagian dari banyak wilayah kerja PT PEP di Indonesia,

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<p>transaksi vendor cukup banyak dan signifikan. Semakin tinggi volume dan nilai transaksi, semakin besar potensi risiko administrasi maupun kontrol.</p> <p>5. Risiko pengawasan eksternal Karena berada di bawah pengawasan SKK Migas dan sebagai BUMN, setiap kesalahan pembayaran atau pencatatan berpotensi menjadi temuan audit.</p>
2.	Pernahkah terjadi kasus keterlambatan pembayaran atau kesalahan yang mempengaruhi hubungan dengan vendor/ <i>supplier</i> ? apa penyebabnya?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Tidak Pernah
3.	Bagaimana penanganan jika ditemukan ketidaksesuaian data antar <i>invoice</i> vendor dengan catatan internal?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Apabila ditemukan selisih atau ketidaksesuaian antara <i>invoice</i> vendor dan data internal, maka dokumen tersebut tidak langsung diproses, tetapi dikembalikan untuk diperbaiki. Prosedurnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jr <i>Field Finance</i> bertindak sebagai verifikator dokumen yang masuk ke <i>Finance</i>. • Untuk <i>invoice</i> vendor, proses verifikasi awal juga dibantu oleh <i>Account Payable</i>. • Untuk dokumen deklarasi dan SP3, dilakukan verifikasi awal terlebih dahulu sebelum ditandatangani. • Jr <i>Field Finance</i> menandatangani sebagai bentuk pengesahan keabsahan dokumen. Jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, dokumen dikembalikan ke <i>user</i> untuk diperbaiki atau dilengkapi sesuai ketentuan. <p>Dengan demikian, koreksi dilakukan pada tahap verifikasi sebelum masuk</p>

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<p>ke proses pembayaran, sehingga meminimalkan risiko kesalahan lebih lanjut.</p> <p>Dampak terhadap jadwal pembayaran</p> <p>Secara umum, ketidaksesuaian dokumen tidak berdampak signifikan terhadap keterlambatan pembayaran, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses verifikasi berdasarkan TKO memiliki batas waktu maksimal 15 hari, namun dalam praktiknya rata-rata selesai dalam ± 1 minggu atau bahkan pada hari yang sama. • Term of Payment (TOP) adalah 30 hari, sehingga masih tersedia waktu yang cukup setelah proses verifikasi selesai. <p>Keterlambatan biasanya hanya terjadi pada kasus tertentu yang menuntut pembayaran dipercepat (misalnya pembayaran tanah, listrik, atau wifi), bukan karena selisih <i>invoice</i> yang tidak tertangani.</p>
4.	Apakah ada kasus <i>fraud</i> atau penyimpangan dalam proses pembayaran yang pernah terdeteksi? Bagaimana cara penanganannya?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Tidak Ada
5.	Menurut pengalaman, faktor apa yang paling sering menyebabkan risiko dalam pembayaran utang usaha?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Berdasarkan pengalaman, risiko dalam pembayaran utang usaha dapat dibagi menjadi risiko internal (dari <i>Finance</i>) dan risiko eksternal (di luar <i>Finance</i>).</p> <p>1. Risiko Internal (dari sisi <i>Finance</i>)</p> <p>Faktor yang paling sering muncul biasanya bersifat administratif dan human error, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesalahan input angka atau data saat proses pencatatan. • Kelalaian dalam verifikasi dokumen (misalnya kuitansi tidak bermaterai atau dokumen belum lengkap).

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<ul style="list-style-type: none"> • Potensi kesalahan klasifikasi atau kekeliruan saat memproses <i>invoice</i>. <p>Risiko ini umumnya berasal dari faktor manusia (<i>human error</i>) dalam proses dokumen dan sistem.</p> <p>2. Risiko Eksternal (di luar <i>Finance</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>User</i> salah menggunakan kontrak (misalnya pembayaran seharusnya menggunakan kontrak A tetapi menggunakan kontrak B). • Kesalahan atau ketidaksesuaian dokumen dari vendor. • Gangguan teknis seperti mati listrik atau internet yang dapat menghambat proses input sistem.

G. Kepatuhan dan *Monitoring*

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1.	Sejauh mana proses pembayaran utang usaha mematuhi standar kepatuhan seperti SOP Governance atau regulasi OJK/BPK?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Proses pembayaran utang usaha pada dasarnya dapat dinilai telah mematuhi standar kepatuhan SOP Governance dan regulasi eksternal apabila seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur tertulis, didukung pemisahan fungsi yang jelas, terdokumentasi dalam sistem, serta tidak menimbulkan temuan material dalam audit internal maupun eksternal. Tingkat kepatuhan umumnya berada pada kategori baik selama tidak terdapat penyimpangan signifikan atau pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan.
2.	Bagaimana frekuensi dan metode audit internal terhadap siklus pembayaran dilakukan? Apa temuan umumnya?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Frekuensi: Dilaksanakan sekitar dua kali dalam setahun, meskipun waktunya tidak tetap. Dalam praktiknya, audit internal sering berbarengan atau berkaitan dengan audit eksternal seperti dari SKK Migas atau BPKP. Biasanya, ketika auditor eksternal meminta data, permintaan tersebut terlebih dahulu melalui tim internal audit, kemudian diteruskan ke unit terkait.</p> <p>Metode pelaksanaan:</p>

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dokumen dan sampel transaksi pembayaran. • Konfirmasi kepada <i>Finance</i> atau <i>user</i> apabila ditemukan ketidaksesuaian. • Evaluasi kepatuhan terhadap prosedur, governance, dan potensi <i>fraud</i>. <p>Selain audit periodik, terdapat juga pengendalian rutin melalui ICOVER (<i>Internal Control over Financial Reporting</i>) yang dilakukan setiap bulan. Dalam ICOVER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit mengunggah sampel <i>invoice</i> melalui <i>website</i> khusus. • Dicek kesesuaian dengan TKO, kelengkapan dokumen, dan otorisasi. • Dipastikan <i>approval</i> berjalan sesuai batas kewenangan ($\leq$ Rp2,5 miliar oleh <i>Assistant Manager</i>; $>$ Rp2,5 miliar oleh <i>Senior Manager Finance</i> Regional 4).
3.	Apakah ada sanksi atau tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran kepatuhan dalam proses pembayaran?	Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Mengenai kecurangan manipulasi angka atau tanggal, tim <i>finance</i> hanya bisa mengecek berdasarkan dokumen tertulis (Berita Acara).</p> <p>Jika Berita Acara menyatakan tidak ada keterlambatan, maka tidak dikenakan penalti, meskipun kenyataannya mungkin ada keterlambatan di lapangan. Tim <i>finance</i> tidak bisa mengetahui kenyataan di lapangan.</p> <p>Denda (penalti) atas keterlambatan pekerjaan (barang atau jasa) sering terjadi.</p> <p>Denda dihitung per hari.</p> <p>Pengenaan denda harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak (vendor dan <i>user</i>) agar vendor tidak terkejut saat pembayaran dipotong.</p> <p>Jika keterlambatan disebabkan oleh pihak perusahaan (misalnya lokasi belum siap), vendor tidak dikenakan penalti, dengan didukung surat bebas penalti.</p>

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<i>Account Payable</i> menyimpan data rutin penalti yang dikenakan pada vendor untuk referensi saat ada pertanyaan pembayaran.
4.	Bagaimana peran teknologi (ERP/SAP) dalam memastikan kepatuhan otomatis pada proses pembayaran?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Peran teknologi, khususnya ERP/SAP (MySAP), sangat penting dalam memastikan kepatuhan otomatis dalam proses pembayaran, terutama dari sisi pencatatan, <i>monitoring</i>, dan pengendalian transaksi.</p> <p>Beberapa peran utamanya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan Terintegrasi dan Terdokumentasi Seluruh transaksi pembayaran dicatat dalam sistem SAP sehingga setiap <i>invoice</i> memiliki jejak digital yang jelas. Sistem ini menjadi dasar konsolidasi data oleh Regional 2 dan pusat, mengingat <i>Field</i> tidak menyusun laporan keuangan sendiri. • <i>Monitoring</i> Term of Payment (TOP) dan Backlog SAP memungkinkan proyeksi dan pemantauan pembayaran berdasarkan TOP (misalnya 30 hari). Jika terdapat transaksi yang melebihi jangka waktu (misalnya >3 bulan), sistem dapat mengidentifikasi sebagai backlog. Hal ini menjadi alat kontrol untuk memastikan transaksi diselesaikan tepat waktu sesuai KPI perusahaan. • Kontrol Otorisasi dan <i>Approval</i> Melalui sistem, <i>approval</i> berjalan sesuai batas kewenangan (misalnya ≤ Rp2,5 miliar oleh <i>Assistant Manager</i> dan > Rp2,5 miliar oleh <i>Senior Manager</i>). Sistem tidak dapat diproses ke tahap berikutnya tanpa <i>approval</i> sesuai otorisasi, sehingga mencegah pelanggaran prosedur. • Dasar Pelaporan dan Konsolidasi Data dari SAP digunakan untuk penyusunan laporan seperti:

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			<ul style="list-style-type: none"> • Laporan produksi (EP21 & EP22) • Laporan backlog (utang, piutang, outstanding pembayaran) • Pelaporan PPN untuk dikliring oleh Regional <p>ERP/SAP berfungsi sebagai alat pengendalian internal berbasis sistem yang membantu memastikan transaksi tercatat sesuai prosedur, dipantau berdasarkan waktu penyelesaian, dan hanya dapat diproses apabila telah memenuhi persyaratan <i>approval</i>. Sistem ini memperkuat kepatuhan administratif dan mendukung akurasi pelaporan ke tingkat regional dan pusat.</p>
5.	Apa saran dan perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan dan pengendalian dalam siklus pembayaran utang usaha?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Peningkatan kepatuhan dan pengendalian dalam siklus pembayaran utang usaha memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup penyempurnaan SOP, optimalisasi sistem digital, penguatan <i>monitoring</i> berbasis KPI, serta peningkatan integritas dan kompetensi SDM. Dengan perbaikan tersebut, risiko kesalahan, keterlambatan, dan <i>fraud</i> dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas proses pembayaran secara keseluruhan.

H. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
1.	Bagaimana proses evaluasi dan perbaikan pengendalian internal dilakukan secara periodik?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Audit internal Regional 4 sebanyak dua kali dalam setahun, untuk memastikan proses bisnis sesuai prosedur, governance, dan tidak terdapat potensi <i>fraud</i>. Jika ada temuan (misalnya kesalahan klasifikasi cost recovery), dilakukan klarifikasi dan adjustment jurnal. • ICOVER (<i>Internal Control over Financial Reporting</i>) setiap bulan, dengan <i>upload</i> sampel <i>invoice</i> melalui <i>website</i> khusus untuk memastikan

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			kelengkapan dokumen, kesesuaian TKO, serta <i>approval</i> sesuai batas kewenangan ($\leq$ Rp2,5 miliar oleh <i>Assistant Manager</i> ; $>$ Rp2
2.	Apakah ada benchmark dengan unit Pertamina EP lain terkait pengendalian pembayaran?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	Secara formal tidak disebutkan adanya benchmarking khusus antar <i>Field</i> . Namun, karena seluruh wilayah kerja berada di bawah struktur Pertamina EP dan mengikuti TKO, SAP, ICOVER, serta audit Regional 4, maka sistem pengendalian yang diterapkan relatif seragam dan terstandarisasi antar unit.
3.	Menurut bapak/ibu apa kekuatan dan kelemahan utama dari sistem pengendalian internal saat ini?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi berlapis (Jr <i>Field Finance</i>, AP, <i>Assistant Manager</i>, <i>Senior Manager</i>). • Pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>) antara verifikasi, <i>approval</i>, dan <i>Treasury</i>. • <i>Monitoring</i> rutin melalui ICOVER setiap bulan. • Dukungan sistem ERP/SAP yang terintegrasi. • Audit internal dua kali setahun serta pengawasan dari SKK Migas dan BPKP. <p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko human error dalam input dan verifikasi dokumen. • Ketergantungan pada kelengkapan dokumen dari <i>user/vendor</i>. • Potensi gangguan teknis (listrik/internet). • Kompleksitas <i>cost recovery</i> yang berisiko salah klasifikasi.
4.	Bagaimana keterlibatan manajemen tingkat atas dalam memastikan kepatuhan siklus pembayaran?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>) & Informan 2 (<i>Account Payable</i>)	<p>Manajemen terlibat melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem <i>approval</i> berjenjang berdasarkan nilai transaksi ($\leq$ Rp2,5 miliar oleh <i>Assistant Manager</i>; $>$ Rp2,5 miliar oleh <i>Senior Manager Finance</i> Regional 4). • Pengawasan melalui ICOVER bulanan. • Tindak lanjut atas temuan audit internal maupun eksternal. Klarifikasi dan koreksi jika terdapat

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
			kesalahan klasifikasi biaya yang berdampak pada PNL.
5.	Apa rencana perubahan atau peningkatan sistem dalam 1-1 tahun ke depan terkait proses keuangan ini?	Informan 1 (Jr. Analyst <i>Field Finance</i>)	Dalam 1 tahun ke depan, arah perubahan sistem keuangan berfokus pada digitalisasi dan integrasi melalui pengembangan Super Apps dan inisiatif Shared Service <i>Finance</i> (SSF). Meskipun terdapat tantangan dalam penyatuan standar antar anak perusahaan, langkah ini berpotensi meningkatkan efisiensi, memperkuat pengendalian internal, serta menciptakan proses pembayaran utang usaha yang lebih transparan, terstandarisasi, dan terdigitalisasi secara menyeluruh.

Lampiran 3. Sistem aplikasi P2P dan Outputnya

← → <https://apps.perseriknawacore/TokareTutur/Invoice/Docu/DocuSubmitInvoice?Token=39344342803034443303&Vendor=103894> Friday, 23 January 2020 9:59:40 AM

Renewable Spirit

Procurement To Pay Process

Home PR PO SA BASTP Banka Acara SP3 FKG Invoice SLA Report Settings Employees SPC APP

Welcome, Kingkin Kurniasih@perseriknawacore (Kingkin@perseriknawacore) | [Logout](#)

✓ New INVOICE
 • Success create new INVOICE with No. Ticket : 39344342803034443303

Vendor: 103894

Invoice Form	Check List Mandatory Document	Check List Another Document
No. Ticket : 1234567890 Invoice Received Date : 12/31/2019 No. Invoice : 0111000000000000 Vendor Invoice Date : 15/01/2020 No. Faktur Pajak : 03002463070000000000 Faktur Pajak Date : 15/01/2020 Currency : IDR Amount (Invoice + PPN) : 41000000	☒ Invoice ☒ Purchase Order ☒ GR / SA ☐ Check/Uncheck All	☒ Faktur Pajak ☒ Banka Acara ☒ Kuftansi ☐ Surat Setoran Pajak ☐ Progress Report ☐ Absensi Pelajar ☐ Bukti Setoran Jamsostek ☒ SP3 ☐ Nota Perhitungan SP3 ☐ Nota Renalti ☐ Kerja Kurang Lebih ☐ Kontrak

Back Print

Displayed: 10 Item / Page

No. Bon	Tgl. BASTP	Vendor	Keterangan User	Informasi PO / SA / GR
33/01/2020	01/01/2020	160000 PT. PERSERIKNAWACORE		3700000000 2046 Pelajaran Pemangsaan U Ditch & Sakawati Waf 0000000000000000 0010000000
33/01/2020	01/01/2020	160000 PT. PERSERIKNAWACORE		3700000000 2046 Pelajaran Pemangsaan U Ditch & Sakawati Waf 0000000000000000 0000000000

Form Request Invoice With PO

Invoice ID : **3081005**

23/01/2026 10:12:43

Inputted By : kingkiri-triya (kingkiri-triya@perimeter.com)

COMPANY CODE	2001									
PO NUMBER	3700000000									
VENDOR INFORMATION										
Vendor Number	000640004									
Vendor Name	PT. PETRO TEKNIK KUNINGTORONGI									
Vendor NPWP	93508674000000									
Address	Po Box 60175 KOTA SURABAYA 31-3099000									
Bank Details	1: ID BRI-ID-BLO-5579 02100000400007 PT. PETRO TEKNIK KUNINGTORONGI									
OTV INFO										
Name										
City										
AMOUNT	37.528.000,00									
CURRENCY	IDR									
BASIC DATA										
Invoice Date / Tax Date	20200000									
Posting Date	20200000									
Business Place	0500 ASSET 4									
Invoice Text	W402_0000000000000026_PEMASANGAN U-DITCH DI SKW									
PAYMENT DATA										
Payment Terms	R002 : Within 10 days Due net									
Baseline Date	20200000									
Payment Method	T: Bank Transfer									
MIRO Items from PO										
No	Amount	Quantity	PO Number	Ref Document						
1	35.000,00	1,000	3700000000	1004000000						
2	1.000,00	1,000	3700000000	1004000000						
TAX INFORMATION										
Reference (Faktur Pajak/PJ)	0302600000000002									
VAT Tax Code	SA									
VAT Amount	4.120.000,00									
No	Withholding Tax Name	Code	Base Amount							
1	PPh 23- Jasa Penunjang Migas-2%*	A9	254000000,00							
<table border="1"> <tr> <td>PREPARED BY</td> <td>VERIFIED BY</td> <td>APPROVED BY LEGAL REQUESTOR</td> </tr> <tr> <td>DEWI ANDRIATI</td> <td>KIRKIN SATRIA</td> <td>SULENDA PAIS</td> </tr> </table>					PREPARED BY	VERIFIED BY	APPROVED BY LEGAL REQUESTOR	DEWI ANDRIATI	KIRKIN SATRIA	SULENDA PAIS
PREPARED BY	VERIFIED BY	APPROVED BY LEGAL REQUESTOR								
DEWI ANDRIATI	KIRKIN SATRIA	SULENDA PAIS								

Lampiran 4. Sistem aplikasi MYSAP

Display Document: Data Entry View

Display Document: Data Entry View

Taxes Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number: 5100000000 Company Code: 2001 Fiscal Year: 2022
 Document Date: 03.01.2022 Posting Date: 06.05.2022 Period: 1
 Reference: 0300200000000000 Cross-Comp.No.:
 Currency: IDR Texts exist: Ledger Group:

PK	GL Account	Account	Description	Text	Curr. 1	Amount 1	Amount in LC Cling doc.	Order	Cost Center	WBS element	Assignment
3	2000000000	1000000000	PT. LESTARI	WAB	IDR	17.200.000,00	17.200.000,00				2000000000
10	2000000000	2000000000	CLC 07M		IDR	18.000.000,00	18.000.000,00	2000000000	5400000000	5400000000	2000000000
93	6090000000	6090000000	RL POKOK GUDANG		IDR	0,00	0,00	5000000000	5000000000	5000000000	2000000000
40	1010000000	1010000000	PREPAID EXPENSE		IDR	1.800.000,00	1.800.000,00				2000000000
50	2000000000	2000000000	VAT 0100000000		IDR	1.800.000,00	1.800.000,00				2000000000
50	2000000000	2000000000	PPN 0100000000		IDR	360.000,00	360.000,00				2000000000
					IDR	0,00	0,00				

Lampiran 5. Sistem aplikasi P-Office

P-Office 3.0

Meilia Rumpahan

CORRESPONDENCE

New correspondence

Inbox

Drafts

Sent items

Direct

Disposition

Rejected

Archive

Documents

Sekretaris Asst. Manager Field Finance Zona 11 & 12
PT Pertamina EP Cepu | 2046

Search

26/1/2026 11:13 WIB

Asst. Manager Field Finance Zona 11 & 12

Permohonan Pembayaran Tagihan PT....

Surat Keluar

26/1/2026 9:29 WIB

Asst. Manager Field Finance Zona 11 & 12

Permohonan Pembayaran SP3 & Deklarasi Field...

Surat Keluar

23/1/2026 15:32 WIB

Asst. Manager Field Finance Zona 11 & 12

Permohonan Pembayaran Invoice Pertamina Tra...

Surat Keluar

22/1/2026 13:22 WIB

Asst. Manager Field Finance Zona 11 & 12

Permohonan Pembayaran Tagihan USD PT....

Surat Keluar

Permohonan Pembayaran...

Surat Keluar

Asst. Manager Field Finance Zona 11 & 12
[Field Finance Zona 11 & 12]

Details Preview

1 of 1

ikmegas

Tujuan: 00000000000000000000

No. 00000000000000000000

Lampiran: 3 (Tipe: Permohonan Pembayaran Invoice Pertamina)

Pada: 26/01/2026

Yang berkepentingan: 1 YB. Bapak/Ibu Asst. Manager Treasury PT Pertamina EP

Dengan hormat,

Menyapa pada surat ini "PENTYDAAN JASA PETUGAS LITING UNTUK FUNGSI OPERASI PT PERTAMINA EP Cepu" yang sebelumnya telah kami lakukan verifikasi, dinyatakan layak bayar dan sudah jadi bayar dengan invoice sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Total
1	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
6	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
8	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
11	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
12	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
13	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
14	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
15	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
16	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
17	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
19	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
20	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
21	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
22	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
23	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
24	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
25	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
26	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
27	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
28	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
29	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
30	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
31	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
33	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
34	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
36	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
37	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
38	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
39	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
40	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
41	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
42	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
43	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
44	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
45	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
46	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
47	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
48	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
49	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
50	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
51	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
52	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
53	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
54	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
55	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
56	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
57	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
58	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
59	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
60	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
61	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
62	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
63	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
64	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
65	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
66	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
67	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
68	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
69	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
70	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
71	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
72	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
73	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
74	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
75	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
76	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
77	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
78	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
79	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
80	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
81	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
82	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
83	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
84	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
85	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
86	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
87	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
88	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
89	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
90	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
91	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
92	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
93	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
94	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
95	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
96	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
97	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
98	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
99	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00
100	Jasa Litigasi	1.000.000,00	1.000.000,00

Dengan ini kami harap semua pihak dapat melakukan pembayaran atas invoice tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

Asst. Manager Field Finance Zona 11 & 12

Asst. Manager Field Finance Zona 11 & 12

Buana Rata

Download